



NASIONAL

Indonesia Pangkas Ekspor Gas, Singapura: Dampaknya Tak Signifikan, Kurang dari 2%

Oleh Redaksi · 25 Okt, 22.51 WIB



BANDA ACEH - Otoritas Pasar Energi Singapura (Energy Market Authority/EMA) menyatakan pengurangan pasokan gas alam dari Indonesia hanya berdampak kurang dari 2 persen terhadap kebutuhan harian negara tersebut. Singapura menyebut masih memiliki sejumlah alternatif untuk menjaga pasokan energi

di tengah kebijakan pemangkasan ekspor gas Indonesia.

Pengurangan pasokan itu mulai berlaku pada Sabtu (24/10/2026). Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto sebelumnya mengumumkan pengurangan ekspor sebesar 31 miliar British thermal unit per hari (BBTUD).

Rinciannya, pasokan gas dari Natuna dikurangi 15 BBTUD, sedangkan dari Sumatera sebesar 16 BBTUD.

Namun, berdasarkan informasi dari importir gas di Singapura, EMA menyebut pengurangan pasokan yang tercatat mencapai 17 BBTUD selama 18 hari.

Angka tersebut tergolong kecil dibandingkan kebutuhan gas

harian Singapura yang mencapai lebih dari 1.000 BBTUD.

"EMA memahami bahwa importir kami akan menempuh semua langkah yang tersedia dalam kontrak mereka terkait gangguan pasokan gas ini," ujar juru bicara EMA, dikutip dari The Straits Times, Minggu (25/10/2026).

DALAM EDISI INI

NASIONAL	2
Aneka Berita	11

NASIONAL

'Rocky Gerung Jadi Duta Penguasa ke Kampus, Mahasiswa Terancam Jadi Ternak Politik Kekuasaan'



BANDA ACEH - Pengamat kebijakan publik Gigin Pragianto melontarkan kritik terhadap Rocky Gerung yang dinilainya kini menjadi duta penguasa ke kampus-kampus. Gigin menilai kehadiran Rocky di lingkungan perguruan tinggi berpotensi men-

jadi sarana untuk memengaruhi cara berpikir mahasiswa demi kepentingan Politik kekuasaan, Ahad (25/10/2026). Gigin bahkan menggunakan istilah keras dengan ...

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ISLAM

Paradoks Sekulerisme Azerbaijan

Oleh Aisyah Karim · 24 Okt, 06.00 WIB

AMAN Open Caucasus Media (OC Media) pada 22/10/2026 melaporkan sejumlah penahanan dilakukan pasca aksi demonstrasi di Nardaran, pinggiran ibu kota Baku, menyusul gelombang unjuk

rasa warga yang menentang kebijakan larangan penggunaan kerudung/khimar/hijab di lingkungan sekolah negeri Azerbaijan.

Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Tak Hadir Rakornas TPAKD, Muslim Arbi: KDM Mulai Membelot dan Melawan Prabowo



BANDA ACEH - Ketidakhadiran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah

(Rakornas TPAKD) yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan Politik.

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

MAKI Adukan Seluruh Pimpinan KPK ke Dewas terkait Nusron Wahid, Ada Apa?



BANDA ACEH - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengadukan seluruh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Aduan ini dilayangkan karena MAKI menilai pimpinan KPK tidak tegas menyikapi dua kali ketidakhadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid dalam panggilan pemeriksaan.

Selengkapnya di halaman 4 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ADVERTORIAL

Selamat dan Sukses

ATAS PELANTIKAN DAN SERTIJAB

BRIGJEN TNI MAHESA FITRIADI, S.A.P., M.M.

Sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda

Oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat
JENDERAL TNI TANDYO BUDI REVITA

di Gedung AH Nasution,
Markas Besar TNI Angkatan Darat,
Jakarta Pusat,
pada hari Jumat, 16 Oktober 2026

Semoga dalam melaksanakan tugas
selalu mendapat rahmat dan petunjuk
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan Terima Kasih Kepada
MAYJEN TNI JOKO HADI SUSILO, S.I.P.
Atas pengabdianya selama ini

Tertanda,
FADHIL ILYAS
Direktur Utama

www.bankaceh.co.id

Bank Aceh Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

NASIONAL

Indonesia Pangkas Ekspor Gas, Singapura: Dampaknya Tak Signifikan, Kurang dari 2%

Oleh Redaksi · 25 Okt, 22.51 WIB



BANDA ACEH - Otoritas Pasar Energi Singapura (Energy Market Authority/EMA) menyatakan pengurangan pasokan gas alam dari Indonesia hanya berdampak kurang dari 2 persen terhadap kebutuhan harian negara tersebut. Singapura menyebut masih memiliki sejumlah alternatif untuk menjaga pasokan energi di tengah kebijakan pemangkasan ekspor gas Indonesia.

Pengurangan pasokan itu mulai berlaku pada Sabtu (24/10/2026). Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto sebelumnya mengumumkan pengurangan ekspor sebesar 31 miliar British thermal unit per hari (BBTUD).

Rinciannya, pasokan gas dari Natuna dikurangi 15 BBTUD,

sedangkan dari Sumatera sebesar 16 BBTUD.

Namun, berdasarkan informasi dari importir gas di Singapura, EMA menyebut pengurangan pasokan yang tercatat mencapai 17 BBTUD selama 18 hari.

Angka tersebut tergolong kecil dibandingkan kebutuhan gas harian Singapura yang mencapai lebih dari 1.000 BBTUD.

"EMA memahami bahwa importir kami akan menempuh semua langkah yang tersedia dalam kontrak mereka terkait gangguan pasokan gas ini," ujar juru bicara EMA, dikutip dari The Straits Times, Minggu (25/10/2026).

EMA juga menyatakan telah menyiapkan rencana kontingensi untuk menghadapi kemungkinan gangguan pasokan gas.

EMA menjelaskan, Singapura sebelumnya pernah menghadapi pengurangan pasokan gas sebesar 20 BBTUD hingga 100 BBTUD dalam beberapa bulan terakhir.

Gangguan tersebut disebabkan oleh kegiatan pemeliharaan terencana maupun mendesak.

Pada periode tersebut, kekurangan pasokan berhasil diatasi dengan memanfaatkan sumber gas lainnya.

EMA menegaskan Singapura memiliki pasokan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Gas alam sendiri menyumbang sekitar 95 persen dari kebutuhan listrik Singapura. Selama ini, negara tersebut memperoleh gas melalui jaringan pipa dari Indonesia dan Malaysia, serta mengimpor gas alam cair atau Liquefied Natu-

ral Gas (LNG) dari berbagai negara.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber tertentu, Singapura juga berupaya memperluas pilihan pasokan energi. Langkah tersebut mencakup pemasangan panel surya serta penelitian teknologi energi baru, termasuk nuklir dan panas bumi.

Juru bicara EMA menyebut Singapore GasCo, perusahaan utama yang menangani pengadaan dan penyaluran gas alam di Singapura, siap meningkatkan impor apabila dibutuhkan.

Selain itu, perusahaan pembangkit listrik di Singapura diwajibkan mempertahankan cadangan bahan bakar yang mencukupi, termasuk solar, untuk memastikan pembangkitan listrik tetap berjalan.

NASIONAL

‘Rocky Gerung Jadi Duta Penguasa ke Kampus, Mahasiswa Terancam Jadi Ternak Politik Kekuasaan’

Oleh Redaksi · 25 Okt, 21.58 WIB



BANDA ACEH - Pengamat kebijakan publik Gigin Pragianto melontarkan kritik terhadap Rocky Gerung yang dinilainya kini menjadi duta penguasa ke kampus-kampus. Gigin menilai kehadiran Rocky di lingkungan perguruan tinggi berpotensi menjadi sarana untuk memengaruhi cara berpikir mahasiswa demi kepentingan Politik kekuasaan. Ahad (25/10/2026).Gigin bahkan menggunakan istilah keras dengan menyebut mahasiswa berpotensi dijadikan “ternak politik kekuasaan” melalui proses yang ia gambarkan sebagai pencucian otak.

Pernyataan tersebut menyoroti persoalan independensi kampus sebagai ruang intelektual yang semestinya terbuka bagi pertukaran gagasan, perdebatan kritis, dan kebebasan akademik.

Menurut kritik Gigin, kampus tidak seharusnya menjadi tempat untuk membentuk mahasiswa agar mengikuti kepentingan politik pihak tertentu. Perguruan tinggi justru diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang berani menguji kebijakan pemerintah, mempertanyakan kekuasaan, serta menyampaikan kritik berdasarkan argumentasi dan data.

Kehadiran tokoh publik di kampus, termasuk mereka yang memiliki pandangan politik tertentu, memang dapat menjadi bagian dari dinamika diskusi akademik. Namun, persoalan muncul apabila forum pendidikan dinilai digunakan untuk membangun dukungan politik tanpa memberikan ruang yang memadai bagi perbedaan pendapat.

Kritik Gigin juga mengingatkan pentingnya mahasiswa menjaga kemandirian berpikir di tengah persaingan kepentingan politik.

Mahasiswa memiliki tradisi panjang sebagai kelompok intelektual yang ikut mengawasi jalannya pemerintahan dan menyuarakan aspirasi masyarakat.

Karena itu, setiap gagasan yang disampaikan tokoh publik di lingkungan kampus semestinya diuji secara kritis, bukan diterima begitu saja. Mahasiswa perlu membandingkan argumen, memeriksa fakta, dan menilai kebijakan berdasarkan dampaknya bagi masyarakat.

Meski demikian, penilaian bahwa Rocky Gerung menjadi duta penguasa dan berupaya mencuci otak mahasiswa merupakan kritik Gigin yang memerlukan penjelasan serta bukti pendukung. Tanpa informasi mengenai forum, materi pembicaraan, dan pernyataan spesifik yang dipersoalkan, tuduhan tersebut belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang terverifikasi.

Belum terdapat pula tanggapan Rocky Gerung dalam bahan informasi yang tersedia untuk berita ini.

Perdebatan tersebut pada akhirnya mengangkat pertanyaan mendasar mengenai posisi kampus dalam kehidupan demokrasi: apakah perguruan tinggi tetap menjadi ruang pembentukan nalar kritis yang independen, atau justru menjadi arena perebutan pengaruh politik?

Bagi mahasiswa, tantangan utamanya adalah mempertahankan kebebasan berpikir dan tidak membiarkan identitas politik siapa pun menggantikan tradisi akademik yang mengutamakan argumentasi, bukti, dan keterbukaan terhadap kritik.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Survei IPO Sebut Raja Juli Antoni Menteri Berkinerja Terburuk, Iftitah Paling Tak Dikenal Publik

Oleh Redaksi · 24 Okt, 19.38 WIB

BANDA ACEH - Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyampaikan, bahwa Raja Juli Antoni adalah sosok Menteri di Kabinet Merah Putih yang mendapatkan sentimen paling buruk dari masyarakat.

Hal ini disampaikan Dedi saat merilis hasil survei lembaganya yang dilakukan dalam kurun waktu 12 – 21 Oktober 2026.

Di mana ketika responden ditanya nama-nama Menteri manakah di bawah ini yang bekerja

paling buruk, muncul Menteri Kehutanan dengan 36,6 persen.

“Yang paling buruk Raja Juli dengan 36,6 persen. Disusul Menteri HAM Natalius Pigai 21,8 persen. Menteri PU Dody Hanggodo 9,4 persen. Nusron Wahid 6,5 persen. Ferry Joko Juliantono 8,3 persen. Yassierli 5,7 persen,” kata Dedi dalam rilis survei via Zoom Meeting yang dikutip Holopis.com, Sabtu (24/10/2026).

Selanjutnya ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dengan 5,3 persen. Disusul Menteri Peru-

mahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan 4,2 persen.

Yang terakhir adalah Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dengan 3,9 persen. Sementara yang tidak menjawab atau tidak tahu ada 32,5 persen.

Selain itu, survei IPO juga menangkap sosok menteri dengan tingkat ketidakterkenalan tinggi. Juaranya adalah Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dengan skor 82,5 persen.

Disusul dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi dengan 79,2 persen.

Lalu ada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widiyanti dengan 63,4 persen.

Selanjutnya adalah Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji dengan 52 persen.

NASIONAL

Komaruddin Watubun: Jadi Satpam Saja Berijazah, Wapres Gibran?

Oleh Redaksi · 24 Okt, 19.30 WIB

BANDA ACEH - Anggota Komisi II DPR RI, Komaruddin Watubun menyatakan, rakyat kecil yang sekedar mencari sesuap nasi untuk menyambung hidup lewat lamaran menjadi Satpam atau cleaning servis saja harus berijazah.

“Sementara Wakil Presiden Republik Indonesia untuk urusan ijazah sebagai syarat mutlak atau

Boarding Pass menjadi Wakil Presiden saja menjadi pro-kontra yang tidak berkesudahan,” kata Komaruddin, Jakarta, Sabtu (24/10/2026).

Oleh karena itu, sudah sepatutnya anggota DPR RI melakukan fungsi pengawasan untuk memastikan keabsahan ijazah Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Tak Hadir Rakornas TPAKD, Muslim Arbi: KDM Mulai Membelot dan Melawan Prabowo

Oleh Redaksi · 25 Okt, 21.57 WIB



BANDA ACEH - Ketidakhadiran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan Politik. Pengamat Politik dan hukum Muslim Arbi menilai, absennya Dedi berpotensi memunculkan pertanyaan mengenai loyalitas politiknya kepada Prabowo dan Partai Gerindra. Muslim menduga, Dedi mulai menunjukkan sikap politik yang lebih mandiri seiring meningkatnya popularitas dan munculnya namanya dalam bursa calon presiden 2029.

” KDM mulai membelot dan melawan Prabowo. Dia merasa percaya diri dengan hasil berbagai

survei yang menempatkan dirinya di atas Prabowo. Ini bisa menjadi modal politik bagi KDM untuk membangun ambisi yang lebih besar pada Pilpres 2029,” kata Muslim Arbi dalam keterangannya, Ahad (25/10/2026).

Menurut Muslim, ketidakhadiran Dedi dalam acara nasional yang dihadiri Presiden Prabowo layak menjadi bahan evaluasi politik. Terlebih, Dedi merupakan kader Gerindra yang sebelumnya menyatakan dukungan untuk memenangkan Prabowo pada Pemilu 2024.

“Kalau seorang kader partai yang juga menjabat gubernur tidak hadir dalam agenda yang dihadiri presiden, tentu publik bisa bertanya. Apakah ini murni persoalan pekerjaan pemerintahan atau

ada dinamika politik yang lebih besar? Ini perlu dicermati,” ujar nya.

Muslim mengaitkan dugaan meningkatnya kepercayaan diri Dedi dengan hasil survei elektabilitas calon presiden 2029 yang dirilis Tempo Data Science pada Agustus 2026.

Berdasarkan survei yang dilakukan pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2026 terhadap 1.260 responden di 38 provinsi, Dedi Mulyadi memperoleh elektabilitas 41 persen dalam simulasi pemilihan presiden, sedangkan Prabowo Subianto memperoleh 15 persen. Anies Baswedan berada di posisi berikutnya dengan 10 persen.

Survei tersebut menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan

95 persen dan margin of error sekitar 2,9 persen. Hasil ini merupakan potret pendapat responden pada periode survei, bukan kepastian hasil Pemilu 2029. (Katadata Databoks, 27 Agustus 2026).

Muslim menilai angka tersebut dapat memperkuat posisi tawar Dedi dalam percaturan politik nasional.

“Ketika seorang kepala daerah memperoleh angka elektabilitas tinggi, tentu muncul peluang untuk membangun kekuatan politik sendiri. Persoalannya, apakah popularitas itu akan digunakan untuk memperkuat Gerindra dan mendukung Prabowo atau justru menjadi kendaraan menuju pencalonan presiden,” kata Muslim.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

8 Kali Reshuffle, Prabowo Disorot Haus Kekuasaan demi Pilpres 2029

Oleh Redaksi · 24 Okt, 16.00 WIB

BANDA ACEH – Pengamat Kebijakan Publik Fernando Emas menyoroti frekuensi perombakan (reshuffle) kabinet Presiden Prabowo Subianto yang disebut telah mencapai delapan kali.

Ia mempertanyakan apakah reshuffle benar-benar didasarkan pada evaluasi kinerja menteri atau justru menjadi instrumen untuk mengakomodasi kepentingan Politik menjelang Pilpres 2029.

Kepada Monitorindonesia.com, Sabtu (24/10/2026), Fernando mengatakan, pergantian anggota kabinet yang berulang memunculkan pertanyaan mengenai pertimbangan utama Presiden dalam menentukan komposisi pemerintahannya.

“Kalau mencermati pernyataan tersebut, kemungkinan Presiden Prabowo Subianto di sisa masa jabatannya akan sering melakukan reshuffle kabinet. Pemerintahan Prabowo Subianto masih berjalan dua tahun, tetapi sudah melakukan

delapan kali reshuffle kabinet,” ujar Fernando.

Ia mengibaratkan reshuffle seperti pergantian pemain dalam pertandingan sepak bola. Menurutnya, sejumlah nama yang berada di luar kabinet bisa saja telah disiapkan untuk menggantikan menteri yang sedang menjabat.

“Sama seperti pemain sepak bola, pemain cadangan berada di luar lapangan. Berarti Prabowo sudah mempersiapkan beberapa nama yang akan dimasukkan dalam kabinet menggantikan para anggota kabinet saat ini,” katanya.

Fernando mempertanyakan apakah pergantian tersebut benar-benar mengutamakan kinerja dan kompetensi. Ia menilai reshuffle berpotensi menjadi sarana mengakomodasi berbagai kelompok politik untuk memperkuat dukungan terhadap pemerintahan.

“Reshuffle dilakukan hanya untuk memberikan kesempatan lebih banyak kepada yang pro dan

kontra terhadap pemerintahan bisa menikmati masuk menjadi anggota kabinet. Tujuannya agar bisa memuluskan untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2029,” tegasnya.

Fernando bahkan melontarkan kritik keras terhadap arah politik tersebut. “Sehingga semakin memperjelas bahwa Prabowo haus kekuasaan dan ingin melanggengkan kekuasaannya,” ujar nya.

Ia juga menyampaikan prediksi politik mengenai masa depan kepemimpinan Prabowo. “Namun, seperti hal tersebut akan sia-sia karena saya perkirakan Prabowo Subianto tidak akan menuntaskan kepemimpinannya sampai akhir masa jabatannya dan Pilpres 2029 tanpa Prabowo Subianto,” pungkas Fernando.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian dan prediksi politik Fernando Emas, bukan kepastian mengenai kelangsungan masa jabatan Presiden.

NASIONAL

Presiden PKS Minta Tindakanjuti Putusan MK Terkait Ijazah Wapres

Oleh Redaksi · 24 Okt, 19.34 WIB

BANDA ACEH - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzamil Yusuf menginstruksikan fraksi PKS agar menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka di DPR RI.

Demikian diungkapkan oleh politisi senior PKS yang juga anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera saat dihubungi monitorindonesia.com, Sabtu (24/10/2026).

“Presiden PKS AMY (Al Muzamil Yusuf) sudah minta ditindaklanjuti keputusan MK,” kata Mardani Ali Sera.

Selain menindaklanjuti putusan MK, Presiden PKS, tambahnya, juga minta dilakukan perbaikan penyelenggaraan Pemilu ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Dino Patti Djalal Buka Suara soal Kabar Ketemu Dubes Singapura dan Saiful Mujani

Oleh Redaksi · 25 Okt, 20.08 WIB



BANDA ACEH -Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal membantah kabar yang menyebut dirinya bersama analis Politik Saiful Mujani menemui Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Kwok Fook Seng, di kediamannya pada Minggu, 18 Oktober 2026.

Dino menegaskan kabar yang beredar di media sosial tersebut sepenuhnya fiktif. Ia mengaku sedang berada di Perth, Australia, selama tiga hari dan baru kembali ke Indonesia pada Selasa malam.

“Saya ingin memberikan klarifikasi bahwa berita itu 100 persen fiktif, totally fabricated (sepenuhnya dikarang), karena pada hari Minggu itu saya berada di Perth, Australia selama tiga hari dan baru kembali Selasa malam,” ujar Dino dalam video klarifikasi yang dikutip redaksi, Minggu, 25 Oktober 2026.

Dino menjelaskan, keberadaannya di Perth untuk berbicara dalam sesi mengenai perubahan iklim yang diselenggarakan NLSM Global Citizen. Ia juga sempat bertemu Presiden Timor-Leste Jose Ramos-Horta selama berada di Australia.

Ia turut membantah pernah bertemu Saiful Mujani untuk urusan tersebut. Menurut Dino, dirinya mengetahui Saiful sebagai analis yang memiliki keahlian dalam

survei kuantitatif, tetapi tidak pernah melakukan pertemuan dengannya sebagaimana dituduhkan dalam unggahan tersebut.

“Saya juga tidak ada urusan dan tidak pernah bertemu dengan beliau,” lanjut mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat ini.

Dino bahkan mengaku sudah bertahun-tahun belum berkunjung ke kediaman Dubes Singapura di Jakarta, meskipun keduanya berteman baik. Ia berkelakar akan segera menghubungi Kwok Fook Seng untuk mengundangnya berkunjung ke AKSC Library Cafe di Kemang dan menikmati dendeng balado masakan ibunya.

Ia pun meminta masyarakat lebih waspada terhadap informasi yang beredar di media sosial, terutama jika menyangkut reputasi seseorang dan hubungan Indonesia dengan negara lain.

Klarifikasi Dino sejalan dengan pernyataan resmi Kedutaan Besar Singapura di Jakarta yang juga membantah kabar tersebut.

Kedubes Singapura menegaskan tidak pernah ada kunjungan Dino dan Saiful ke kediaman Kwok Fook Seng pada 18 Oktober 2026. Kedubes menyebut informasi yang beredar sebagai disinformasi dan menyatakan akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menanganinya.

NASIONAL

Evaluasi Raja Juli Antoni, Seharusnya Menteri Kehutanan Punya Rencana Mitigasi Karhutla

Oleh Redaksi · 24 Okt, 19.24 WIB

BANDA ACEH - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjadi orang paling bertanggung jawab dan layak dievaluasi karena belum maksimal menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia sepanjang 2026.

Ketua Bidang Lingkungan Hidup Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira), Efrain Yerry Tawalujan mengatakan, kejadian karhutla bisa dicegah jika Raja Juli selaku menteri sudah punya rencana mitigasi.

“Seharusnya Menteri Kehutanan telah mempersiapkan rencana dan langkah aksi mitigasi bencana yang terukur. Lalu, melibatkan instansi terkait yang ikut bertanggung jawab untuk segera mengatasi karhutla sedini mungkin,” kata Yerry, dalam keterangannya, Sabtu 24 Oktober 2026.

Menurut Yerry, Kementerian Kehutanan semestinya menjadi

garda terdepan dalam penanganan karhutla. Gencarkan kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI-Polri, pemerintah daerah, serta perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah terdampak.

“Kementerian Kehutanan yang seharusnya menjadi motor penggerak dan mengoordinasikan upaya pemadaman bersama lembaga-lembaga pemerintah lain dan perusahaan-perusahaan perkebunan di lokasi karhutla,” ujar nya.

Yerry menyoroti kebakaran yang berlangsung selama berbulan-bulan dan berdampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan.

Menurutnya, kabut asap akibat karhutla mengganggu kehidupan masyarakat. Sementara kebakaran juga mengancam habitat satwa liar, termasuk orang utan dan merusak kawasan hutan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

MAKI Adukan Seluruh Pimpinan KPK ke Dewas terkait Nusron Wahid, Ada Apa?

Oleh Redaksi · 25 Okt, 20.20 WIB



BANDA ACEH - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengadukan seluruh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Aduan ini dilayangkan karena MAKI menilai pimpinan KPK tidak tegas menyikapi dua kali ketidakhadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid dalam panggilan pemeriksaan.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengajukan aduan tersebut secara daring pada Minggu (25/10/2026). Dia menilai KPK seharusnya mengambil tindakan lebih tegas, termasuk menerbitkan surat perintah membawa terhadap Nusron.

"Mestinya KPK tegas dengan cara jemput paksa terbitkan surat perintah membawa kepada Nusron Wahid," ujar Boyamin, Minggu (25/10/2026).

Boyamin mengatakan, persoalan saksi yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan bukan hanya terjadi dalam kasus Nusron. Dia juga menyinggung ketidakhadiran Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin dalam kasus proyek jalan di Sumut serta Witjaksono dalam kasus Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

"Dengan abai, takut dan lemotnya KPK atas mangkirnya panggilan saksi-saksi, maka menjadikan wibawa hukum dan wibawa KPK jatuh di mata masyarakat. Dan

KPK dipandang rendah oleh saksi-saksi yang harusnya patuh hukum," kata Boyamin.

Menurutnya, sikap KPK yang dinilainya tidak tegas dapat memengaruhi kepatuhan saksi lain terhadap panggilan penyidik. Dia khawatir tidak adanya tindakan lanjutan membuat saksi merasa dapat mengabaikan panggilan pemeriksaan tanpa konsekuensi.

"Tindakan KPK ini akan berdampak calon-calon saksi akan makin membangkang terhadap panggilan KPK karena tidak adanya risiko apa pun," ujar Boyamin.

Dia juga membandingkan penanganan saksi dari kalangan masyarakat dengan kasus yang melibatkan pihak lain. Boyamin mencon-

tohan dirinya yang pernah dikenai surat perintah membawa meski baru sekali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

Atas dasar itu, MAKI meminta Dewas KPK menindaklanjuti aduan tersebut. Boyamin berharap Dewas memeriksa dugaan pelanggaran etik dan ketidakprofesionalan pimpinan maupun penyidik KPK dalam menangani saksi yang tidak memenuhi panggilan.

"MAKI sangat perlu mengadukan masalah ini kepada Dewan Pengawas KPK untuk memberikan teguran dan sanksi kepada Pimpinan dan Penyidik KPK atas dugaan pelanggaran etik dan ketidakprofesionalannya dalam menegakkan hukum yang berkeadilan," ucapnya

NASIONAL

Dino Patti Djalal Endus Tim Siluman Mulai Bergerak

Oleh Redaksi · 25 Okt, 20.12 WIB



BANDA ACEH -Dino Patti Djalal menduga ada pola terorganisasi di balik penyebaran kabar fiktif yang mengaitkan dirinya dan analis Politik Saiful Mujani dengan pertemuan bersama Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Kwok Fook Seng.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri ini menilai penyebaran kabar melalui sejumlah akun media sosial tidak bisa serta-merta dianggap sebagai tindakan iseng. Ia mencurigai adanya tim yang bekerja secara terkoordinasi untuk membentuk persepsi tertentu di tengah masyarakat.

"Ini mencerminkan adanya satu modus operandi yang baru, yaitu suatu teknik di mana suatu tim yang tidak diketahui wujudnya, anggotanya, saya katakan tim siluman, mereka membuat berita-berita yang fiktif, posting di berbagai akun yang mereka buat sendiri," ujar Dino dikutip dari video klarifikasinya, Minggu, 25 Oktober 2026.

Menurutnya, pola tersebut diduga dirancang untuk menciptakan kesan bahwa informasi berasal dari banyak sumber independen, padahal ia mencurigai penyebarannya terkoordinasi.

"Saya katakan ini adalah mumi dari bawah tapi tidak, ini adalah

aksi yang terkoordinir, terorganisir, dan ada backing-nya," kata dia tanpa menyebut detail siapa yang dimaksud.

Mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat ini secara tegas membantah kabar dirinya bersama Saiful Mujani mengunjungi kediaman Dubes Singapura di Jakarta pada Minggu, 18 Oktober 2026. Informasi tersebut sepenuhnya fiktif.

Ia menyebut di hari yang sama sedang berada di Perth, Australia untuk berbicara dalam sesi perubahan iklim yang diselenggarakan NLSM Global Citizen. Ia baru kembali ke Indonesia pada Selasa malam.

Kedutaan Besar Singapura di Jakarta juga telah mengeluarkan klarifikasi resminya hari ini. Kedubes menegaskan tidak ada kunjungan kedua tokoh tersebut ke kediaman Kwok Fook Seng pada tanggal yang disebutkan dalam unggahan media sosial.

"Tidak ada kunjungan seperti itu yang terjadi. Ini jelas merupakan disinformasi, dan Kedutaan Besar akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia untuk mengatasinya," tegas pernyataan Kedubes Singapura hari ini.

ADVERTORIAL

Selamat dan Sukses

ATAS PELANTIKAN DAN SERTIJAB

BRIGJEN TNI MAHESA FITRIADI, S.A.P., M.M.

Sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda

Oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat
JENDERAL TNI TANDYO BUDI REVITA

di Gedung AH Nasution,
Markas Besar TNI Angkatan Darat,
Jakarta Pusat,
pada hari Jumat, 16 Oktober 2026

Semoga dalam melaksanakan tugas
selalu mendapat rahmat dan petunjuk
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan Terima Kasih Kepada
MAYJEN TNI JOKO HADI SUSILO, S.I.P.
Atas pengabdianya selama ini

Tertanda,
FADHIL ILYAS
Direktur Utama

Bank Aceh Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

www.bankacehsyariah.co.id

NASIONAL

150 Guru Besar Desak Gibran Mundur, Ini Tanggapan Relawan Jokowi-Prabowo-Gibran

Oleh Redaksi · 25 Okt, 20.16 WIB



BANDA ACEH - Perwakilan Koalisi Relawan Jokowi-Prabowo-Gibran, David Pajung, menanggapi desakan 150 guru besar dari berbagai daerah agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur secara sukarela. David menilai desakan tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat karena Gibran terpilih melalui Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

David menyebut Gibran memperoleh dukungan sekitar 58 persen suara atau lebih dari 90 juta pemilih bersama Presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Menurutnya, hasil pemilihan langsung tersebut harus dihormati.

"Wakil Presiden ini terpilih secara sah, didukung oleh mayoritas rakyat Indonesia, yaitu 58

persen pemilih di Pilpres 2024 atau sekitar 90 juta lebih jiwa rakyat Indonesia yang memilih," ujar David Pajung, Minggu (25/10/2026).

Dia juga membandingkan jumlah pemilih dalam Pilpres 2024 dengan anggota forum guru besar yang menyampaikan desakan tersebut. David menilai jumlah anggota forum tidak sebanding dengan suara pemilih yang menentukan pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

"Nah, kalau forum guru besar ini, forum yang dibentuk ini itu hanya beranggotakan seratusan orang, itu enggak bisa, enggak sebanding dengan 90 juta orang lebih yang mencoblos Prabowo dan Gibran sebagai pimpinan bangsa ini," katanya.

David menegaskan, desakan agar Wapres mundur harus mengacu pada mekanisme konstitusional. Dia merujuk Pasal 7 hingga Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amendemen keempat.

"Kalau para profesor ini baca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca-amandemen keempat, di Pasal 7 hingga 7B, sama sekali tidak ada ruang masuk bagi forum mana pun untuk meminta presiden atau wakil presiden mundur tanpa dasar hukum yang jelas," ucapnya.

Sebelumnya, DPP PDIP menerima surat terbuka dari Forum Guru Besar Indonesia yang mendesak Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden. Forum tersebut juga berharap Presiden Prabowo

Subianto dan partai Politik di parlemen mendengarkan tuntutan mereka.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan hal tersebut saat berada di Sekolah Rakyat PDIP, Jakarta Selatan, Rabu 21 Oktober 2026. Surat terbuka itu berjudul Menjaga Marwah Konstitusi, Etika Bernegara, dan Legitimasi Kepemimpinan Nasional.

"Suara-suara seperti inilah yang juga harus didengarkan oleh Presiden Prabowo, oleh partai-partai di DPR," ujar Hasto.

Hasto menjelaskan, surat tersebut memuat sejumlah kritik, di antaranya mengenai keteladanan dan etika bernegara.

NASIONAL

Prabowo Belum Sepenuhnya Lepas dari Bayang-Bayang Jokowi

Oleh Redaksi · 25 Okt, 13.40 WIB



BANDA ACEH -Presiden Prabowo Subianto dinilai belum mampu memutuskan sepenuhnya pengaruh Joko Widodo meski telah memasuki tahun kedua pemerintahannya.

Menurut Guru Besar Universitas Airlangga, Prof Henri Subiaktio, Prabowo masih memberi ruang bagi kepentingan dan kesinambungan kebijakan orang-orang Jokowi. Kondisi itu membuat arah kepemimpinan Prabowo dinilai belum menunjukkan ketegasan dalam menghadapi warisan pemerintahan sebelumnya.

"Prabowo itu mix signal. Kesannya dia berkuasa, tapi tak mampu menghilangkan bayang bayang mantan bos yang dulu mengangkanya jadi jenderal penuh dan jadi kepala negara," kata Henri lewat akun X miliknya, Minggu, 25 Oktober 2026.

Ia menilai gaya kepemimpinan dan komunikasi Prabowo memang berbeda dari Jokowi. Namun, keduanya dinilai masih menjaga hubungan karena memiliki kepentingan masing-masing.

"Walau sekarang sudah tidak seharmonis di awal-awal Pemerintahan, tapi Prabowo nampak tak berani putus total apalagi berhadapan," ujarnya.

Henri juga menyoroti sikap Prabowo terhadap polemik ijazah Jokowi dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurutnya melemahkan Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari sisi moral. Ia menilai Prabowo belum memberikan respons tegas terhadap persoalan tersebut.

"Isu ijazah dan putusan MK yg sangat melemahkan Jokowi

Gibran dari sisi moral pun tidak direspon tegas oleh Prabowo. Seolah hanya jadi catatan dan simpanan peluru yang tidak harus terburu digunakan," katanya.

Di sisi lain, Henri mengkritik cara sebagian masyarakat memandang kepemimpinan Jokowi. Ia mengakui pernah percaya pada penampilan dan pernyataan Jokowi, yang menurutnya mampu membangun citra sebagai sosok sederhana dan dekat dengan rakyat.

"Saya pernah percaya dan ter-tipu juga dengan ucapan dan penampilan yang penuh polesan Jokowi. Sekarangpun masih banyak yang buta terhadap sosok ini, hanya karena suka dengan hasil kerja pemerintahannya dulu yg terlihat sukses membangun infrastruktur," tulisnya.

Henri menilai keberhasilan pembangunan infrastruktur yang terlihat secara fisik tidak cukup untuk menilai keseluruhan kinerja pemerintahan. Ia menyoroti konsekuensi utang pembangunan, kondisi Politik, serta dampak terhadap etika dan tatanan demokrasi.

"Padahal pembangunan infrastruktur yang 'nampak sukses' itu aslinya membawa bom waktu, saat tagihan tagihan hutang harus dibayarkan. Stabilitas politik yg seolah tenang, sejatinya menyimpan jeratan jeratan politik penyanderaan pada hampir semua partai politik," ungkapnya.

Ia juga memperingatkan dampak jangka panjang dari kerusakan tatanan demokrasi dan ketergantungan pada pihak asing.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Putusan MK Bisa jadi Alasan Prabowo Ingin Pisah dengan Gibran dan Jokowi

Oleh Redaksi · 24 Okt, 15.53 WIB

BANDA ACEH - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukanlah sesuatu yang akan membebani Presiden Prabowo Subianto maupun Gibran.

Menurut Pengamat Politik Hendri Satrio atau Hensat, putusan itu justru sangat mungkin menjadi jalan keluar sekaligus alasan bagi Prabowo dan kubu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Gibran untuk berpisah, lalu menempuh jalan masing-masing di Pemilu 2029.

"Keputusan MK bukan beban bagi Prabowo ataupun Gibran/Jokowi, keputusan MK justru dapat jadi solusi, alasan, jalan keluar bila mereka ingin berpisah jalan di 2029," ujarnya

kepada wartawan, Sabtu, 24 Oktober 2026.

"Alasannya simpel saja. Anda enggak mau lindungi saya, saya juga punya jalan sendiri. Ya sudah, kita pisah saja," sambungnya.

MK membacakan putusan tersebut pada Selasa (6/10/2026). Majelis menyatakan permohonan tidak dapat diterima dan tidak bisa mendiskualifikasi Gibran.

Namun, dalam pertimbangannya, MK tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA dan menilai KPU lalai memeriksa syarat administrasi pencalonan.

Istana sendiri menyatakan Presiden tidak akan melakukan intervensi terkait putusan tersebut.

Tanda-tanda perpisahan itu, kata Hensa, sudah terlihat dari rangkaian sikap Jokowi.

"Kan awalnya kata Pak Jokowi, Prabowo-Gibran dua periode. Kemudian Pak Jokowi bilang 2029 masih lama. Kemudian Pak Jokowi juga mengumumkan dia anggota PSI, memanaskan mesin atau memanaskan aura kompetisi di Bandung, di kandangnya Pak Prabowo. Kemudian berbagai peristiwa Politik terjadi, yang bisa terbaca sangat mungkin Prabowo dan Gibran/Jokowi tidak sejalan lagi atau akan menempuh jalan sendiri-sendiri di 2029," ujarnya.

Menurut Hensat, langkah Jokowi bergabung dengan PSI sama saja dengan memajukan jadwal kompetisi pemilu secara implisit.

Partai politik lain, kata Hensat, akan membaca langkah itu sebagai tanda kesiapan Jokowi, baik dari sisi kekuatan akar rumput maupun logistik.

"Semua partai politik yang memahami seorang Jokowi pasti memahami, oh, dia memanaskan mesin. Logistiknya sudah siap, akar rumput juga sudah bersatu. Jangan-jangan memang Pak Jokowi yang logistiknya paling siap hari ini," tuturnya.

Gibran sendiri, masih kata Hensat, memilih terus berkeliling sambil menabung suara lewat blusukan ala Jokowi, sesuatu yang menurut dia tidak bisa dilakukan Prabowo.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Komaruddin Watubun Minta DPR Awasi Keabsahan Ijazah Gibran

Oleh Redaksi · 24 Okt, 16.04 WIB

BANDA ACEH - Anggota Komisi II DPR RI, Komaruddin Watubun menyatakan, sudah sepatutnya DPR RI melakukan fungsi pengawasan untuk memastikan keabsahan ijazah Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

"Kalau bertanya kepada saya sebagai anggota DPR-RI yang diberi tiga fungsi menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu adalah fungsi pengawasan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia maka perlu DPR melaksanakan fungsi tersebut untuk memastikan keabsahan

Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming," kata Komaruddin saat dimintai tanggapannya terkait wacana pembentukan Panitia Khusus Hak Angket pasca putusan MK terkait ijazah Gibran, Jakarta, Sabtu (24/10/2026).

Penggunaan fungsi pengawasan oleh DPR RI, kata politisi senior PDI Perjuangan itu juga untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dimata hukum.

"Ini sekaligus menjunjung tinggi Indonesia sebagai negara hukum. Jadi setiap warga negara sama di mata hukum.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

Oleh Redaksi · 25 Okt, 13.51 WIB



BANDA ACEH - - Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, dikabarkan akan mendeklarasikan diri menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Berdasarkan informasi yang diperoleh JawaPos.com, deklarasi pergantian pucuk pimpinan parpol bergambar gajah tersebut, rencananya akan dilakukan pada awal November mendatang.

Dalam deklarsi tersebut, sejumlah tokoh-tokoh Politik lain seperti Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias Kang Dedi Mulyadi (KDM) dikabarkan akan bergabung dari Partai Gerindra ke PSI. Nantinya, setelah resmi bergabung, KDM rencananya akan disandingkan dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk

berkontestasi pada Pilpres 2029 mendatang.

Dikonfirmasi terkait adanya rumor pergantian pucuk pimpinan partainya, Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron mengatakan, terdapat permintaan dari sejumlah kader di daerah yang mengusulkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi ketua umum.

Atas usulan itu, ia pun menyampaikan langsung saat dirinya berkunjung ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Rabu (21/10).

"Waktu ke Solo, saya menyampaikan aspirasi beberapa pengurus daerah," kata Bro Ron dikonfirmasi JawaPos.com, Minggu (25/10).

Bro Ron menyatakan, PSI sangat terbuka terhadap usulan setiap kader. Karena itu, usulan tersebut masih menjadi pembahasan di tingkat internal.

"Sebagai partai super terbuka, tentunya kami membebaskan kader untuk bersuara dan kita tampung untuk saat ini," tegasnya.

Meski demikian, Bro Ron menegaskan usulan agar Jokowi menjadi ketua umum PSI tidak sepenuhnya dapat terwujud. Ia menegaskan, saat ini pihaknya masih fokus untuk menyelesaikan struktur sampai tingkat desa dari Sabang sampai Merauke.

"Belum tentu terwujud. Tergantung situasi politik eksternal dan internal. Untuk saat ini masih fokus menyelesaikan struktur

sampai tingkat desa dari Sabang sampai Merauke," ungkapnya.

Di lain pihak ketika ditanya soal kabar gabungannya KDM ke partainya dan akan diduetkan dengan Gibran pada Pilpres 2029 mendatang, Bro Ron langsung membantahnya.

"Kabar burung saja. Tidak pernah ada pertemuan dengan pimpinan PSI bahkan dibicarakan internal. KDM sudah berada di partai besar, partai pemenang dan sudah cocok disana," tukasnya.

Bro Ron menyebut, partainya masih setia untuk menduetkan Gibran dengan Prabowo selaku Ketua Partai Gerindra.

"Untuk saat ini belum berubah, dukung Prabowo-Gibran sampai selesai," pungkasnya

NASIONAL

KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang

Oleh Redaksi · 25 Okt, 13.54 WIB



BANDA ACEH - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM dikabarkan akan bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Rencana gabungannya KDM akan diumumkan bertepatan dengan rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo deklarasi menjadi ketua umum partai berlambang Gajah, pada awal November mendatang.

Terkait adanya kabar gabungannya KDM ke partainya, Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron membantahnya. Begitu juga soal rencana KDM akan diduetkan dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk Pilpres 2029 mendatang.

"Kabar burung saja. Tidak pernah ada pertemuan dengan pimpinan PSI bahkan dibicarakan internal. KDM sudah berada di partai besar, partai pemenang dan sudah cocok disana," tukasnya.

Bro Ron menyebut, partainya masih setia untuk menduetkan Gibran dengan Prabowo selaku Ketua Partai Gerindra.

"Untuk saat ini belum berubah, dukung Prabowo-Gibran sampai selesai," tukasnya.

Sementara itu, terkait kabar Jokowi yang akan mendeklarasikan diri menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bro Ron mengatakan, terdapat

permintaan dari sejumlah kader di daerah yang mengusulkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi ketua umum.

Atas usulan itu, ia pun menyampaikan langsung saat dirinya berkunjung ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Rabu (21/10).

"Waktu ke Solo, saya menyampaikan aspirasi beberapa pengurus daerah," kata Bro Ron dikonfirmasi JawaPos.com, Minggu (25/10).

Bro Ron menyatakan, PSI sangat terbuka terhadap usulan setiap kader. Karena itu, usulan tersebut masih menjadi pembahasan di tingkat internal.

"Sebagai partai super terbuka, tentunya kami membebaskan kader untuk bersuara dan kita tampung untuk saat ini," tegasnya.

Meski demikian, Bro Ron menegaskan usulan agar Jokowi menjadi ketua umum PSI tidak sepenuhnya dapat terwujud. Ia menegaskan, saat ini pihaknya masih fokus untuk menyelesaikan struktur sampai tingkat desa dari Sabang sampai Merauke.

"Belum tentu terwujud. Tergantung situasi Politik eksternal dan internal. Untuk saat ini masih fokus menyelesaikan struktur sampai tingkat desa dari Sabang sampai Merauke," ungkapnya

NASIONAL

Angkat Dua Anaknya Jadi Tenaga Ahli, Menhaj Gus Irfan Disentil: Kiamat Sudah Dekat

Oleh Redaksi · 24 Okt, 09.55 WIB

BANDA ACEH — Pengangkatan dua putra Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan sebagai tenaga ahli di kementerian yang dipimpinnya menuai sorotan.

Pengamat Politik Saiful Mujani bahkan melontarkan sindiran tajam terhadap keputusan yang diambil Gus Irfan.

Sebab dinilai memunculkan pertanyaan tentang profesionalisme dan potensi nepotisme di lingkungan pemerintahan.

Kritik itu disampaikan Saiful melalui akun X miliknya, @saiful_mujani, Jumat (23/10/2026).

Saiful menyoroti praktik seorang pejabat yang menunjuk anaknya sendiri untuk menjadi penasihat.

"Bapak ngangkat anak jadi penasehat dirinya sebagai menteri

haji dunia udah dekat kiamat," tulis Saiful.

Pernyataan tersebut menambah panjang polemik setelah nama Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz, dua putra Gus Irfan, tercantum dalam dokumen yang disebut sebagai lampiran Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Menteri Haji dan Umrah.

Dokumen tersebut memuat sembilan nama tenaga ahli.

Pencantuman nama kedua putra Gus Irfan memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengangkatan, kualifikasi, transparansi seleksi, hingga potensi konflik kepentingan.

Meski demikian, dugaan nepotisme tidak bisa langsung dianggap sebagai fakta.

Kejelasan mengenai proses penunjukan, persyaratan jabatan, dan kompetensi masing-masing tenaga ahli menjadi kunci untuk menjawab kritik publik.

Gus Irfan Buka Suara soal Keterlibatan Kedua Putranya

Gus Irfan sebelumnya sudah memberikan penjelasan mengenai keterlibatan anak-anaknya dalam pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), lembaga yang mulai dibangun pada akhir Oktober 2024 sebelum berkembang menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

Menurut Gus Irfan, pada masa awal pembentukan BP Haji, lembaga itu belum memiliki kantor, struktur organisasi, maupun staf pendukung yang memadai. Situasi tersebut membuatnya harus mengandalkan bantuan orang-

orang terdekat untuk memulai pekerjaan.

"Keluar dari istana kita enggak punya staf, kita enggak punya kantor, kita enggak punya apa-apa," kata Gus Irfan di Yogyakarta, Jumat (23/10/2026), sebagaimana dikutip dari situs resmi Kementerian Haji dan Umrah.

Ia menjelaskan, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak saat itu mendapat dukungan dari tim Kementerian Pertahanan. Sementara itu, Gus Irfan mengaku dibantu para santri dan anak-anaknya.

Mereka, menurut dia, turut membantu pembentukan BP Haji selama sekitar tiga hingga empat bulan tanpa menerima gaji.

"Akhirnya Bang Dahnil (Wamenhaj sekarang) disambut timnya dari Kementerian Pertahanan, saya disambut ...

NASIONAL

Sebut Prabowo Penganut Sosialisme, Rocky Gerung Diketawakan Profesor Australia, Disuruh Baca Lagi

Oleh Redaksi · 24 Okt, 15.02 WIB

BANDA ACEH - Pakar ekonomi Politik dan Studi Kawasan Asia di Melbourne University, Prof. Vedi R Hadiz, melontarkan kritik keras terhadap sejumlah program strategis pemerintahan Prabowo Subianto.

Ia mengkritik mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), hingga food estate.

Scholar dengan kredensial tinggi di kajian wilayah itu menilai sederet kebijakan tersebut telah menyedot anggaran APBN yang kelewat boros dan lebih berorientasi pada kepentingan politik ketimbang kesejahteraan masyarakat.

Vedi menilai pelaksanaan berbagai program skala nasional tersebut sangat menguras keuangan negara tanpa memberikan dampak nyata bagi perekonomian warga.

Ia menyoroti persoalan teknis di lapangan, seperti kasus keracunan

anak-anak pada program MBG serta indikasi kronisme dalam proyek ketahanan pangan.

"Pemborosan uang untuk program-program yang enggak jelas, kegunaannya buat apa, kecuali buat kepentingan-kepentingan politik mereka aja, tidak buat kesejahteraan rakyat," ujar Vedi Hadiz dikutip dari Threads, Okky Madasari.

Ia menambahkan bahwa program MBG sangat dipertanyakan hasilnya, sementara Kopdes Merah Putih dinilai tidak jelas kontribusinya terhadap perputaran roda ekonomi lokal.

Senada dengan Kopdes, proyek food estate justru lebih banyak memelihara kroni bisnis Prabowo ketimbang mewujudkan kemandirian pangan nasional.

Selain menyoroti efektivitas program pemerintah, Vedi juga menyentil pernyataan anggota Wantimpres Rocky Gerung ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Klarifikasi Lengkap Menkes Budi soal Tuduhan Pakai Tabung Oksigen gegara Tak Kuat Asap Karhutla

Oleh Redaksi · 25 Okt, 11.29 WIB



BANDA ACEH - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin akhirnya buka suara setelah fotonya menggunakan tabung oksigen saat berkunjung ke Kalimantan Tengah (Kalteng) viral di media sosial.

Foto tersebut ramai diperbincangkan karena disertai narasi yang menyebut Budi tidak kuat menghadapi asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), meski belum 24 jam berada di wilayah tersebut.

Narasi yang beredar juga mengaitkan foto tersebut dengan pernyataan Budi yang meminta masyarakat beradaptasi dengan kondisi yang ada. Dia disebut mengalami sesak napas hingga harus menggunakan tabung oksigen.

Namun, Budi membantah narasi tersebut. Melalui akun Instagram pribadinya, dia menegaskan

bahwa foto yang beredar memang benar, tetapi konteks yang disampaikan dalam unggahan tersebut tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya.

"Fotonya memang benar, namun narasi yang beredar itu tidak benar. Saya sama sekali tidak merasa sesak pada saat itu, saya juga terbantu dengan menggunakan masker KN95 selama kunjungan berlangsung dan saya hanya bertujuan memberikan informasi dan edukasi menunjukkan fasilitas Rumah Oksigen seperti yang terekam di video ini," kata Budi dalam keterangan unggahannya, dikutip Minggu (25/10/2026).

Untuk menjelaskan kejadian sebenarnya, Budi turut membagikan video lengkap kunjungannya ke Kalteng. Dalam video itu, dia terlihat mendatangi Rumah Oksigen Muhammadiyah Disaster

Management Center (MDMC) dan Bus Oksigen di Palangka Raya.

Saat berada di Rumah Oksigen MDMC, Budi terlihat duduk sambil menggunakan fasilitas oksigen. Dia mengaku mencoba langsung fasilitas tersebut untuk merasakan manfaatnya, bukan karena mengalami sesak napas seperti yang dituduhkan dalam narasi viral.

"Saya sendiri coba, jauh lebih enak seger saturasi oksigen saya naik," ujar Budi.

Kunjungan itu dilakukan untuk memperkenalkan fasilitas yang dapat dimanfaatkan masyarakat ketika mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap karhutla. Rumah Oksigen MDMC menyediakan ruangan dengan penyaringan udara menggunakan HEPA, sementara Bus Oksigen disiapkan Pemprov Kalteng untuk

menjangkau masyarakat yang kesulitan mengakses fasilitas tersebut.

Budi mengatakan, keberadaan layanan oksigen juga penting bagi relawan dan petugas pemadam kebakaran yang terpapar polusi udara saat bertugas memadamkan api.

"Tabung oksigen diberikan kepada yang membutuhkan, terutama relawan yang memadamkan api, mereka yang terekspos banyak polusi yang tinggi. Mereka perlu untuk kita buat sehat," katanya.

Dia pun mengimbau masyarakat yang mulai mengalami sesak napas akibat paparan asap untuk segera mencari pertolongan.

NASIONAL

Gagasan Luhut Hapus Kerugian Negara Berpotensi Jadi Karpet Merah Koruptor

Oleh Redaksi · 25 Okt, 13.43 WIB



BANDA ACEH -Simpul Aktivis Gerakan 98 (Siaga 98) melontarkan kritik keras terhadap gagasan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) terkait kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi (TPK). Gagasan tersebut dinilai tidak tepat dan berpotensi meruntuhkan fondasi keuangan serta perekonomian negara.

Koordinator Siaga 98, Hasanuddin mengatakan, bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia masih berkaitan erat dengan keuangan negara, baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara. Karena itu, unsur kerugian keuangan negara dinilai tetap penting dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Bahwa TPK yang terjadi di Indonesia masih Berbasis Korupsi pada Keuangan Negara, baik dari sumber pendapatan maupun belanja negara," kata Hasanuddin kepada

Menurut dia, perekonomian nasional masih bertumpu pada kebijakan fiskal. Apabila unsur kerugian keuangan negara dihapuskan, kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak serius terhadap fondasi fiskal Indonesia.

"Apabila unsur kerugian keuangan negara dihapuskan, maka bangunan fiskal kita dipastikan runtuh karena praktek korupsi keuangan negara," ujar Hasanuddin.

Hasanuddin menilai gagasan DEN yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan tersebut tidak tepat untuk diterapkan dalam kondisi Indonesia saat ini. Alih-alih memperkuat tata kelola keuangan negara, gagasan itu justru dipandang berpotensi melemahkan upaya penindakan terhadap korupsi yang berkaitan dengan keuangan negara.

"Gagasan DEN saat ini tidak tepat bahkan berpotensi meruntuhkan keuangan negara dan perekonomian negara," tegasnya.

Lebih jauh, Siaga 98 menilai gagasan tersebut berpotensi menguntungkan pelaku korupsi yang berkaitan dengan keuangan negara, mulai dari tingkat nasional hingga pemerintahan daerah dan desa.

"Gagasan ini pro terhadap koruptor keuangan negara baik secara nasional, provinsi, kab/kota bahkan tingkat desa," tutur Hasanuddin.

Atas dasar itu, Siaga 98 berharap Presiden Prabowo Subianto tidak terpengaruh oleh gagasan tersebut. Hasanuddin menekankan pentingnya menjaga komitmen pemberantasan korupsi serta melindungi keuangan negara dari praktik penyimpangan.

"Kami berharap presiden tidak terpengaruh gagasan ini," pungkas Hasanuddin.

NASIONAL

5 Poros Disebut Siap Tantang Prabowo di 2029, Siapa yang Punya Tiket Terkuat?

Oleh Redaksi · 24 Okt, 15.10 WIB

BANDA ACEH - Pengamat Politik Adi Prayitno mengungkapkan lima poros Politik yang dinilai berpotensi menjadi penantang Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2029.

Poros pertama, menurut Adi, adalah poros Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Politikus yang akrab disapa KDM itu dinilai peluang menjadi penantang kuat Prabowo apabila memilih berpisah dari Partai Gerindra dan berhasil memperoleh dukungan dari partai politik lain.

"Tapi beda ceritanya kalau Pak KDM pisah jalan tidak lagi bersama dengan Gerindra dan misalnya mendapatkan salah satu dukungan dari salah satu kekuatan partai politik di negara kita, ya KDM bisa melaju itu PR terbesarnya," ujarnya dalam kanal YouTube Adi Prayitno Official, dikutip Sabtu (24/10).

Poros kedua adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Adi menilai Anies berpotensi maju apabila Partai Gerakan Rakyat berhasil lolos sebagai peserta Pemilu dan mampu memperoleh dukungan dari partai-partai lain, termasuk partai yang memiliki kursi di parlemen.

"Anies tinggal cari tiket apakah Partai Gerakan Rakyat lolos misalnya sebagai salah satu peserta pemilu dan kemudian mampu mendapatkan dukungan dari partai-partai yang lain salah satunya lolos ke parlemen misalnya tinggal kita tunggu," kata Adi.

Selanjutnya, Adi juga memasukkan poros Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), poros Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta poros PDI Perjuangan (PDIP) yang berpotensi diwakili oleh Puan Maharani, Ganjar Pranowo, atau Pramono Anung.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Tiga Nama Jokowi: Purwoko, Mulyono, dan Joko Widodo — Mana yang Benar?

Oleh Redaksi · 24 Okt, 14.30 WIB

BANDA ACEH - Isu soal nama lain Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat.

Klaim yang menyebut nama lahir atau nama kecil Jokowi adalah Purwoko sempat ramai dibicarakan publik, meski Jokowi sendiri membantah mengetahuinya.

Menurut keterangan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dian Sandi Permana (atau Dian Sandi Utama), Jokowi memiliki tiga nama sepanjang hidupnya.

"Nama Pak Jokowi sebenarnya ada tiga. Waktu beliau lahir itu namanya Purwoko. Purwoko nama beliau lahir. Baru kemudian diganti menjadi Mulyono, sampai akhirnya diganti Joko Widodo,"

ujar Dian dalam sebuah perbincangan di YouTube dan kemudian di persidangan.

Dian mengaku mendapat informasi tersebut dari salah satu anggota keluarga Jokowi yang tidak disebutkan namanya.

Klaim ini sempat beredar bersamaan dengan polemik dokumen yang disebut ijazah Jokowi.

Jokowi secara langsung menanggapi klaim tersebut saat ditemui di kediamannya di Solo pada Mei 2025.

Ia menegaskan bahwa seingatnya nama kecilnya adalah Mulyono, bukan Purwoko.

"Saya kan waktu kecil ya enggak ngerti nama saya siapa. Yang jelas, seingat saya nama kecil saat itu Mulyono karena

sakit-sakitan. Itu pun diceritakan oleh orang tua bahwa namanya dulu Mulyono, kemudian karena sakit-sakitan diganti menjadi Joko Widodo," kata Jokowi.

Ia mengaku sama sekali tidak mengetahui atau pernah mendengar nama Purwoko.

Menurutnya, penggantian nama dari Mulyono menjadi Joko Widodo dilakukan orang tuanya sebelum ia masuk sekolah dasar (SD).

Hal ini sesuai dengan tradisi Jawa, di mana nama anak yang sering sakit-sakitan kerap diganti agar nasibnya lebih baik.

Nama Mulyono sendiri memang pernah diakui Jokowi sebagai nama masa kecilnya. Mulyono lahir pada 21 Juni 1961 di Solo

dari pasangan Notomihardjo dan Sujatmi Notomihardjo.

Nama itu kemudian diganti menjadi Joko Widodo.

Isu Purwoko kembali muncul dalam persidangan terkait kasus yang melibatkan Dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Oktober 2026.

Dian Sandi yang menjadi saksi kembali menyebut nama tersebut, dan Dokter Tifa bahkan menyingung potensi keterangan palsu jika klaim itu tidak bisa dibuktikan, dengan rencana mengonfrontasi langsung kepada Jokowi.

Hingga saat ini, tidak ada dokumen resmi atau pernyataan Jokowi yang membenarkan bahwa namanya pernah Purwoko.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan Akui Angkat Anaknya jadi Tenaga Ahli: Bilang Bekerja Sukarela Tak Digaji

Oleh Redaksi · 25 Okt, 10.49 WIB



BANDA ACEH - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan mengakui jika anaknya menjadi tenaga ahli di kementerian yang dipimpinnya. Gus Irfan mengatakan, anak dan sejumlah santrinya bekerja secara sukarela selama tiga hingga empat bulan tanpa memperoleh gaji, sejak terlibat pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), sebelum akhirnya berubah menjadi kementerian.

Irfan mengatakan, ketika dirinya bersama wakil menteri dilantik untuk memimpin BP Haji pada akhir Oktober 2024, lembaga tersebut belum memiliki struktur organisasi, kantor, maupun staf pendukung yang memadai.

"Keluar dari istana kita enggak punya staf, kita enggak punya

kantor, kita enggak punya apa-apa," kata Menhaj dalam keterangan tertulis, Minggu (25/10).

Dalam situasi tersebut, sejumlah orang terdekat ikut membantu proses pembentukan lembaga. Irfan menyebut anak dan para santrinya turut bekerja secara sukarela.

"Akhirnya Bang Dahnil (Wamenhaj sekarang) disambut timnya dari Kementerian Pertahanan, saya disambut santri-santri saya dan sama anak saya. Dan mereka ini yang tanpa diminta membantu pembentukan badan penyelenggara haji itu. Tanpa gaji tanpa apa-apa selama tiga atau empat bulan. Itu yang terjadi," klaimnya.

Gus Irfan mengungkapkan, sejumlah orang yang sebelumnya

membantu kemudian diangkat sebagai tenaga ahli. Menurutnya, pengangkatan tersebut dilakukan terhadap mereka yang dinilai memiliki kompetensi sesuai kebutuhan lembaga.

Sementara itu, sebagian lainnya memilih kembali ke pondok pesantren maupun menjalankan aktivitas masing-masing.

"Sampai kemudian ada beberapa yang saya masukkan menjadi tenaga ahli, ada sebagian kembali ke basic-nya tuh ada yang balik ke pondok, ada yang balik ini, karena mereka hanya sekadar ikhlas membantu," tuturnya.

Irfan turut membeberkan jumlah posisi tenaga pendukung yang tersedia bagi menteri, serta keputusan yang diambilnya dalam mengisi posisi tersebut.

"Kementerian Haji, sebagai menteri saya punya hak untuk menetapkan tiga staf khusus, saya ambil cuma satu. Saya dapat lima tenaga ahli, saya ambil cuma empat," urainya.

Ia pun tak memungkiri, Kementerian Haji dan Umrah masih menghadapi kekurangan pegawai. Berdasarkan analisis jabatan, kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di kementerian tersebut diperkirakan mencapai sekitar 7.000 orang.

Irfan menyebut jumlah pegawai yang tersedia sekitar 3.200 orang. Sementara itu, berdasarkan data internal kementerian, jumlah pegawai saat ini tercatat sebanyak 3.631 orang.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Angkat Anak Jadi Tenaga Ahli Kemenhaj, Gus Irfan Singgung Kekurangan Pegawai

Oleh Redaksi · 24 Okt, 09.49 WIB

BANDA ACEH — Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menjelaskan awal keterlibatan anak dan sejumlah santrinya dalam pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), sebelum sebagian dari mereka diangkat menjadi tenaga ahli di Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

Gus Irfan mengatakan, anak dan para santrinya ikut membantu ketika BP Haji belum memiliki kantor, struktur organisasi, maupun staf pendukung yang memadai.

Mereka disebut bekerja secara sukarela selama tiga hingga empat bulan tanpa menerima gaji.

Keterlibatan tersebut bermula setelah Gus Irfan bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil

Anzar Simanjuntak dilantik memimpin BP Haji pada akhir Oktober 2024.

Saat itu, menurut Gus Irfan, BP Haji belum memiliki fasilitas dan sumber daya manusia untuk menjalankan tugas kelembagaan.

"Keluar dari istana kita enggak punya staf, kita enggak punya kantor, kita enggak punya apa-apa," kata Gus Irfan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Dalam kondisi tersebut, Irfan mengaku dibantu para santri dan anaknya untuk mempersiapkan pembentukan BP Haji.

"Akhirnya Bang Dahnil (Wamenhaj sekarang) disambut timnya dari Kementerian Pertahanan, saya disambut santri-santri saya dan sama anak saya. Dan

mereka ini yang tanpa diminta membantu pembentukan badan penyelenggara haji itu. Tanpa gaji tanpa apa-apa selama 3 atau 4 bulan. Itu yang terjadi," ujarnya.

Seiring perkembangan BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah, sebagian orang yang sebelumnya membantu kemudian diangkat menjadi tenaga ahli. Gus Irfan menyebut pengangkatan dilakukan terhadap pihak yang dinilai memiliki kompetensi sesuai kebutuhan lembaga.

Sementara itu, sebagian lainnya kembali menjalankan aktivitas masing-masing, termasuk ke pondok pesantren.

"Sampai kemudian ada beberapa yang saya masukkan menjadi tenaga ahli, ada sebagian kembali ke basic-nya tuh ada yang balik ke

pondok, ada yang balik ini, karena mereka hanya sekadar ikhlas membantu," tuturnya.

Gus Irfan juga menjelaskan bahwa dirinya tidak menggunakan seluruh alokasi posisi tenaga pendukung yang tersedia untuk menteri.

"Kementerian Haji, sebagai menteri saya punya hak untuk menetapkan tiga staf khusus, saya ambil cuma satu. Saya dapat lima tenaga ahli, saya ambil cuma empat," katanya.

Gus Irfan Paparkan Kekurangan Pegawai Kemenhaj

Di luar polemik pengangkatan tenaga ahli, Gus Irfan turut memaparkan persoalan keterbatasan sumber daya manusia di Kemenhaj.

NASIONAL

Mantan Panglima TNI Laksamana Purn Widodo AS Meninggal Dunia

Oleh Redaksi · 25 Okt, 10.39 WIB



BANDA ACEH - Mantan Panglima TNI Laksamana (Purn) Widodo Adi Sutjipto (AS) meninggal dunia, Minggu (25/10/2026). Kabar meninggalnya Widodo disampaikan akun Instagram Koarmada RI, @koarmada_ri.

Dalam unggahannya, Koarmada RI mengunggah foto ucapan belasungkawa atas meninggalnya Widodo.

"Pangkoarmada RI Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Laksamana TNI (Purn) Widodo Adi Sutjipto Panglima Tentara Nasional Indonesia Ke-14," tulis @koarmada_ri dalam keterangan unggahan.

Koarmada RI juga mendoakan arwah Widodo AS dalam unggahannya.

"Teriring doa, semoga husnul khotimah, mendapatkan rahmat dan maghfiroh dari Allah Subhanahu Wata'ala. Aamiin Yaa Rabbal Alamin," tulis @koarmada_ri.

Diketahui, pria kelahiran Boyolali, Jawa Tengah, 1 Agustus 1944 itu diangkat menjadi Panglima TNI periode 1999-2002 oleh Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Widodo AS menjabat Panglima TNI menggantikan Wiranto.

Serah terima jabatan (sertijab) dari Wiranto kepada Widodo A.S dilakukan di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, pada 4 November 1999. Dikutip dari

laman TNI AL, Widodo AS adalah putra ke-4 dari pasangan Adi Sutjipto dan Siti Fatonah.

Ayahnya Widodo AS berprofesi sebagai seorang guru. Dikutip dari laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Widodo A.S merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) 1968.

Masa jabatan suami Sri Murniati sebagai Panglima TNI itu berakhir pada 18 Juni 2002 dan digantikan oleh Jenderal TNI Endriartono Sutarto.

Karier Widodo AS semakin bersinar. Dia diangkat Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pada periode 21 Oktober 2004 hingga 22 Oktober 2009 menggantikan Hari Sabarno. Dia sempat merangkap menjadi Menteri Dalam Negeri ad-interim pada 2 April-29 Agustus 2007 saat menjabat Menko Polhukam.

Usai masa jabatannya sebagai Menko Polhukam selesai, dia diangkat menjadi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ad-interim pada 1 Oktober-22 Oktober 2009. Setelah itu, Widodo diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Pertahanan dan Keamanan periode 2010-2014.

NASIONAL

Hanura Ingatkan Prabowo Jangan Salah Pilih "Pembantu"

Oleh Redaksi · 24 Okt, 12.42 WIB

BANDA ACEH -Visi besar Presiden Prabowo Subianto dinilai belum diterjemahkan secara optimal oleh jajaran menteri. Karena itu, Prabowo didorong mengevaluasi kabinet dan melakukan perombakan pada awal 2027.

Wakil Ketua Umum DPP Hanura Patrice Rio Capella mengatakan, gagasan Prabowo melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Merah Putih memiliki orientasi kerakyatan. Namun, pelaksanaannya di lapangan dinilai belum berjalan sesuai harapan.

"Sebenarnya ide-ide besar Pak Prabowo sangat humanis, mulai dari MBG agar tidak ada lagi anak bangsa kelaparan, hingga Koperasi Merah Putih untuk mengantisipasi tengkulak yang menjerat petani," ujar Rio usai konsolidasi Tim Task Force DPP Hanura bersama pengurus dan legislator Hanura se-Sulawesi Tenggara di Hotel Claro, Kendari, Jumat, 23 Oktober 2026.

Menurut Rio, persoalan utama terletak pada kemampuan para menteri menerjemahkan visi dan misi Presiden menjadi kebijakan serta pelaksanaan yang efektif.

"Persoalannya ada pada tingkat aplikasi. Apa yang dicita-citakan dan digagas oleh Pak Prabowo sebagai presiden, tidak bisa diterjemahkan oleh para menternya," tegasnya.

Atas dasar itu, Rio mendorong Prabowo mengubah komposisi kabinet dengan lebih mengutamakan profesionalisme dibandingkan akomodasi Politik dan balas budi kepada tim sukses. Ia juga menilai ukuran kabinet yang besar berpotensi memperpanjang koordinasi dan memperlambat pelaksanaan program. Karena itu, evaluasi perlu dilakukan mulai dari tingkat menteri hingga wakil menteri.

"Warna kabinet harus mulai diubah menjadi wajah profesional, agar ide besar presiden bisa diwujudkan."

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Ray Rangkuti: Nusron Sebaiknya Dinonaktifkan

Oleh Redaksi · 25 Okt, 08.15 WIB



BANDA ACEH - Dua kali ketidakhadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam agenda pemeriksaan saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memunculkan desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas. Pengamat Politik Ray Rangkuti menyarankan Nusron dinonaktifkan sementara atau langsung menggantinya melalui perombakan kabinet.

“Ya itu tadi seperti yang disebutkan oleh Bung Iwan (Kurniawan, Ketua Gerakan Cinta Prabowo) ya ada dua pilihan tuh. Pertama nonaktifkan dulu atau yang sekaligus di-reshuffle,” kata Ray dikutip dalam salah satu dialog, Jumat (23/10/2026).

Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani tersebut, langkah itu dapat menjadi sinyal bagi KPK

tindak lanjut KPK terhadap ketidakhadiran Nusron, termasuk belum adanya keputusan mengenai langkah pemanggilan berikutnya. Sikap Presiden Prabowo terhadap menteri-nya itu juga menjadi sorotan.

Ray menilai, Presiden memiliki dua opsi, yakni menonaktifkan Nusron sementara atau langsung menggantinya melalui perombakan kabinet.

“Ya itu tadi seperti yang disebutkan oleh Bung Iwan (Kurniawan, Ketua Gerakan Cinta Prabowo) ya ada dua pilihan tuh. Pertama nonaktifkan dulu atau yang sekaligus di-reshuffle,” kata Ray dikutip dalam salah satu dialog, Jumat (23/10/2026).

Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani tersebut, langkah itu dapat menjadi sinyal bagi KPK

untuk menentukan tindakan selanjutnya sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

“Nah, itu juga memberi sinyal yang lebih kuat kepada KPK untuk segera bertindak apakah akan melakukan proses penjemputan paksa atau dan sebagainya dan sebagainya gitu ya,” ujarnya.

Ray juga menilai, sikap Presiden dalam menangani persoalan tersebut dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keseriusan pemerintah memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

“Nah, dan lebih juga memberi sinyal yang kuat kepada masyarakat bahwa Pak Prabowo tidak pandang dulu tadi soal pemberantasan korupsi gitu,” ucapnya.

Ray Ingatkan Prabowo

Ray mengingatkan, persoalan tersebut berpotensi menyeret nama Presiden Prabowo apabila terus berlarut-larut tanpa kejelasan langkah penanganan.

Ia menilai, situasi itu dapat memunculkan asumsi di tengah masyarakat bahwa Nusron memiliki dukungan dari sosok kuat di lingkaran kekuasaan.

“Tetapi kalau dibiarkan begini-begini terus ya tentu akan menyeret nama Pak Prabowo dan asumsi orang ‘ada orang kuat di belakang Nusron dan orang kuat itu ya presiden’ gitu loh kira-kira,” kata Ray.

Ia menegaskan, Presiden perlu memperlihatkan komitmen pemberantasan korupsi di tengah perhatian publik terhadap penegakan hukum.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Oleh Redaksi · 24 Okt, 08.45 WIB

BANDA ACEH - Politisi Senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, merasa ada yang janggal terkait usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang minta penghapusan unsur kerugian negara sebagai bentuk korupsi.

Mulyanto berpendapat usul itu bertolak belakang dengan semangat negara memberantas dan menghukum pelaku korupsi.

"Saya tidak setuju dengan wacana penghapusan kerugian negara (KN) dalam klausul korupsi, yang dilontarkan Luhut Binsar Panjaitan (DEN). Penyesuaian hukum pemberantasan korupsi dengan United Nations Convention against Corruption (UNCAC) tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan unsur keru-

gian negara dalam tindak pidana korupsi. Sejak awal kita telah mengadopsi aturan UNCAC ini," terang Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat malam, 23 Oktober 2026.

Ia menambahkan reformasi hukum justru harus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan kekayaan negara, terutama dalam pengelolaan aset publik berskala besar, seperti misalnya Danantara.

Menurut Mulyanto, sesuai UNCAC, tindak pidana korupsi tidak harus mengakibatkan kerugian terhadap kekayaan negara. Namun, ketentuan tersebut bukan berarti kerugian negara tidak dapat menjadi unsur tindak pidana korupsi.

Justru UNCAC menegaskan, bahwa korupsi tidak harus menimbulkan kerugian negara. Dan ini bukan berarti kerugian negara harus dikeluarkan dari delik korupsi.

"Saya rasa ini perlu dipahami secara tepat agar reformasi hukum kita tidak kehilangan arah," ujarnya.

Menurut Mulyanto, UNCAC justru mengatur korupsi secara lebih luas, tidak terbatas pada penyuapan, tetapi juga mencakup penggelapan aset publik, perdagangan pengaruh, dan penyalahgunaan fungsi jabatan. UU Tipikor sudah memuat klausul itu.

Karena itu, pembaruan hukum antikorupsi perlu diarahkan untuk memperkuat instrumen pencegahan dan penindakan berbagai

bentuk penyalahgunaan kewenangan, termasuk yang berpotensi merugikan keuangan negara dan kepentingan masyarakat.

Di sisi lain, Mulyanto juga memahami pentingnya kepastian hukum bagi pengambil keputusan publik dan pengelola BUMN. Tidak setiap kerugian negara merupakan tindak pidana korupsi. Risiko bisnis yang wajar dan keputusan profesional yang diambil dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum.

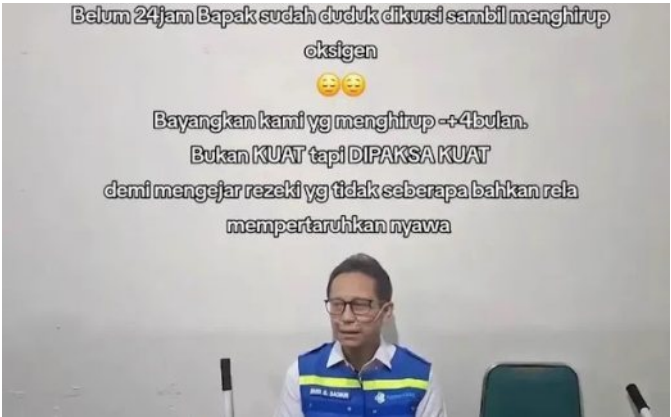
Namun, perlindungan tersebut harus berjalan seiring dengan sistem pengawasan yang kuat.

"Jangan sampai kepastian hukum bagi pengambil keputusan justru mengurangi akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara.

NASIONAL

Pernah Minta Warga Adaptasi dengan Karhutla, Menkes Kini Terekam Pakai Oksigen

Oleh Redaksi · 25 Okt, 10.44 WIB



BANDA ACEH -Pernah meminta warga beradaptasi dengan karhutla, Menkes Budi Gunadi Sadikin kini jadi sorotan setelah terlihat memakai oksigen saat kunjungan ke Kalteng.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah kembali menjadi sorotan.

Kali ini, perhatian publik tertuju pada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang terlihat menggunakan selang oksigen saat mengunjungi Rumah Oksigen MDMC PMW Kalteng.

Momen tersebut viral di media sosial dan memancing komentar warganet yang membandingkannya dengan kondisi warga yang berbulan-bulan menghadapi kabut asap.

Unggahan akun Instagram @surakartakita memperlihatkan Menkes menggunakan bantuan oksigen saat berada di fasilitas tersebut.

Pemandangan itu memicu perdebatan mengenai dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat, terutama mereka yang tetap harus beraktivitas di tengah kualitas udara yang memburuk.

Warganet menyoroti kenyataan bahwa masyarakat setempat tidak selalu memiliki pilihan untuk menghindari paparan asap.

Sebagian warga tetap harus bekerja, bersekolah, dan mencari nafkah meskipun udara di sekitar mereka tercemar.

Salah satu komentar yang mencuri perhatian menggambarkan beratnya situasi yang dihadapi masyarakat.

“Belum 24 jam Bapak sudah duduk di kursi sambil menghirup oksigen. Bayangkan kami yang menghirup selama 4 bulan. Bukan kuat, tetapi dipaksa kuat,” tulis seorang warganet.

Komentar tersebut menggambarkan keresahan warga yang merasa harus bertahan menghadapi kabut asap dalam waktu panjang.

Penggunaan oksigen oleh Menkes pun menjadi pemantik diskusi tentang perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak karhutla.

Dalam kunjungannya ke Kalimantan Tengah, Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak

NASIONAL

Wakil Rakyat Kota Pekanbaru Ribut di Bandara Soetta, Polisi Kelimpungan Panggil Gubernur Riau

Oleh Redaksi · 24 Okt, 09.33 WIB

BANDA ACEH -Polres Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta menyusut kasus dugaan penganiayaan terhadap Anggota DPRD Kota Pekanbaru, berinisial F oleh sesama rekan sejawat berinisial Z di Terminal 3 Domestik Bandara Soekarno-Hatta.

Dugaan penganiayaan itu tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/81/VIII/2026/SPKT/Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta/Polda Metro Jaya, tertanggal 10 Agustus 2026.

Kasat Reskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta Kompol Muhamad Esha menjelaskan proses hukum berjalan berdasarkan laporan yang diterima polisi, bukan kepentingan Politik pihak mana pun.

"Dalam menyelidiki kasus ini, penyidik mengedepankan profesionalisme," ujar Esha dalam keterangan resmi yang diterima redaksi di Jakarta pada Jumat malam, 23 Oktober 2026.

Sejauh ini, Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, mengecek rekaman kamera pengawas

(CCTV), sampai dengan mengirimkan surat permohonan izin atau persetujuan tertulis kepada Gubernur Riau guna meminta klarifikasi terhadap anggota DPRD yang terlibat.

"Pelapor (F) datang untuk membuat laporan, ya kami tindak lanjut. Kami menjalankan tugas sebagai penegak hukum dan tidak ada urusan dengan kepentingan politik," tutur Esha.

Sejauh ini, proses penyelidikan saat ini menghadapi kendala terkait permohonan izin atau persetujuan tertulis yang telah disampaikan kepada Gubernur Riau.

Polisi pun masih berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau untuk memastikan langkah selanjutnya.

"Sekarang kami masih menunggu jawaban. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pengawasan penyidikan dan Biro Hukum Gubernur Riau," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, dugaan penganiayaan itu terjadi pada Sabtu, 8 Agustus 2026, sekitar pukul 10.00 WIB.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ANEKA BERITA

5 BERITA

EROPA

Demo Prancis Kembali Rusuh, 70 Ribu Aparat Dikerahkan

Oleh Redaksi · 25 Okt, 13.45 WIB



BANDA ACEH -Gelombang demonstrasi di Prancis kembali berujung bentrokan pada Sabtu waktu setempat, 24 Oktober 2026. Aksi yang diikuti ratusan ribu orang untuk memprotes kenaikan biaya hidup dan ketimpangan sosial itu berlangsung relatif damai pada awalnya, sebelum kericuhan pecah di Paris dan Marseille saat malam tiba.

Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat sekitar 410 ribu orang mengikuti demonstrasi di berbagai wilayah. Namun, serikat pekerja mengklaim jumlah demonstran sebenarnya mencapai dua kali lipat dari angka resmi pemerintah.

Aksi terbesar berlangsung di pinggiran tenggara Paris dengan sedikitnya 110 ribu orang turun ke jalan menyuarakan penolakan ter-

hadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah.

Situasi memanas setelah demonstrasi berakhir. Di Paris, polisi antihuru-hara menembakkan gas air mata dan menyemprotkan meriam air untuk membubarkan sekitar 500 pemuda bertudung yang terlibat kericuhan.

Sementara di Marseille, sejumlah pemuda membakar tempat sampah untuk memblokir jalan serta melempari aparat dengan batu dan botol.

Polisi melaporkan sejumlah toko, termasuk dua toko perhiasan, dijarah. Bentrokan juga terjadi di Lyon, Bordeaux, Grenoble, Clermont-Ferrand, Lille, Rennes, Nantes, dan Toulouse.

Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kelompok-kelompok berisiko

tinggi memisahkan diri dari barisan utama demonstrasi untuk melakukan aksi kekerasan.

“Hampir di setiap aksi demonstrasi, kami melihat terbentuknya kelompok-kelompok berisiko tinggi ini. Mereka memisahkan diri dari kelompok utama dan berupaya melakukan tindakan kekerasan,” kata Nunez, dikutip Minggu, 25 Oktober 2026.

Dia menuding aktivis sayap kiri radikal dan kelompok kriminal berupaya memicu kerusuhan. Meski demikian, ia menilai kekerasan kali ini tidak seintens pekan sebelumnya.

Pemerintah mengerahkan 70 ribu personel polisi dan gendarmerie, atau 10 ribu lebih banyak dibandingkan pekan sebelumnya, untuk mencegah terulangnya kerusuhan pada 17 Oktober.

Pengamanan ketat membuat sebagian pusat kota Paris menyempai kawasan yang diisolasi.

Sejumlah toko menutup atau melapisi etalase mereka, lebih dari 20 stasiun metro berhenti beroperasi, sedangkan museum Louvre, Musee d’Orsay, dan Paris Opera tutup sementara sebagai langkah antisipasi.

Gelombang protes yang awalnya bermula dari demonstrasi mahasiswa di pinggiran Paris bulan lalu untuk memprotes kondisi sekolah itu berkembang menjadi gerakan yang lebih luas menentang kebijakan ekonomi pemerintah. Aksi tersebut juga menjalar ke negara-negara tetangga.

INTERNASIONAL

Trump Ancam Serang Iran Hari Ini, kecuali...

Oleh Redaksi · 25 Okt, 10.33 WIB



BANDA ACEH - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan ancaman baru terhadap Iran. Dia mengancam akan menyerang Iran pada Minggu (25/10/2026) waktu AS jika negara itu tak mau mencapai kesepakatan.

“Kami sedang memikirkannya, dan mungkin besok,” kata Trump, kepada wartawan, Sabtu (24/10/2026), saat ditanya seberapa jauh dia mempertimbangkan serangan tersebut, seperti dikutip dari Reuters.

“Apa Anda benar-benar berpikir saya akan memberi tahu Anda jika saya melakukannya?” ujarnya, lagi.

Trump melanjutkan, Iran masih bisa menghindari serangan militer lebih lanjut jika mau mencapai kesepakatan dengan AS.

“Mereka ingin membuat kesepakatan, tapi masalahnya adalah apakah mereka akan menepati kesepakatan itu?” tuturnya.

Trump mengulangi dalih perangnya terhadap Iran, serangan AS bertujuan mencegah negara tersebut mengembangkan senjata nuklir. Operasi AS sebelumnya,

lanjut dia, dinilai belum cukup untuk menjamin bahwa program nuklir Iran benar-benar berhenti, meski menggunakan pesawat pengebom B-2.

“Saya harus membuatnya permanen. Itulah satu-satunya alasan saya melakukannya,” ujarnya.

Trump juga mengklaim pengiriman minyak melalui Selat Hormuz meningkat dibandingkan sebelum perang dimulai, namun tak memberikan angka pasti.

Perang AS-Israel melawan Iran yang dimulai pada 28 Februari belum jelas kapan berakhir. Meski ada beberapa kali kesepakatan gencatan senjata, namun tak pernah disepakati, terutama oleh AS yang kembali melancarkan serangan.

Selat Hormuz menjadi ganjalan utama di balik kesepakatan gencatan senjata, kedua pihak saling mengklaim memegang kendali atas jalur perairan strategis tersebut.

Iran terus menyerang kapal-kapal tanker maupun kargo yang melintasi Selat Hormuz tanpa seizinnya, termasuk yang melintasi rute di sisi Oman

APLIKASI

Cara Menonton Video TeraBox Langsung di Browser Tanpa Aplikasi

Oleh Redaksi · 24 Okt, 17.48 WIB

BANDA ACEH - TeraBox banyak dipakai untuk menyimpan dan membagikan video berukuran besar.

Masalahnya, ketika seseorang mengirim tautan TeraBox, penerimanya sering diminta memasang aplikasi atau login dulu sebelum bisa menonton.

Bagi pengguna dengan memori ponsel terbatas atau koneksi yang tidak stabil, langkah ini terasa merepotkan.

Kabar baiknya, video TeraBox sebenarnya bisa diputar langsung lewat browser. Berikut penjelasannya.

- Server yang padat. Pada jam sibuk, kecepatan pemutaran di akun gratis bisa turun drastis.
- Ukuran file besar. Video beresolusi tinggi membutuhkan buffer lebih banyak sebelum bisa diputar mulus.
- Koneksi internet tidak stabil. Sinyal yang naik turun membuat video berhenti di tengah jalan.
- Pemutar bawaan yang terbatas. Tidak semua tautan bisa diputar dengan lancar di aplikasi resminya.

Cara paling praktis adalah memakai pemutar berbasis web. Anda cukup menyalin tautan video, membukanya lewat alat online, lalu video bisa langsung diputar tanpa memasang apa pun.

Salah satu pilihan yang bisa dipakai adalah terabox video player, yang bekerja langsung di browser ponsel maupun laptop.

Langkah umumnya:

- Salin tautan video TeraBox yang dibagikan kepada Anda.
- Buka halaman pemutar di browser Chrome atau browser lain pilihan Anda.
- Tempel tautan pada kolom yang tersedia, lalu tekan tombol proses.
- Tunggu beberapa detik hingga video siap diputar atau diunduh.

Dengan cara ini, Anda tidak perlu mendaftar akun dan tidak memakan ruang penyimpanan ponsel.

- Gunakan jaringan Wi-Fi yang stabil saat memutar video berukuran besar.
- Tutup aplikasi lain yang berjalan di latar belakang agar memori tidak penuh.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ISLAM

Dana Bencana Dikorupsi, Kemana Hati Nurani?

Oleh Yuli Emamarini · 24 Okt, 16.48 WIB

Pergi ke pasar membeli ikan Ikan disimpan di dalam peti Bencana datang membawa kesedihan Malah dikorupsi mereka tak punya hati

ASANYA tidak ada kata-kata lagi yang pantas diucapkan untuk mereka yang tega melakukan korupsi dana bencana di negeri ini.

Bencana sudah membawa luka dan kerugian yang tidak sedikit untuk para korban. Mereka membutuhkan bantuan agar kehidupan mereka bisa kembali pulih.

Namun, mirisnya bantuan yang sangat mereka butuhkan justru diduga menjadi bancakan bagi oknum tertentu alias dikorupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 13 Oktober lalu melau-

kukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara korupsi Dana Siap Pakai (DSP).

Diduga praktik ini telah berlangsung sejak 2022. Diduga ada penyimpangan pengadaan barang dan jasa melalui penunjukan langsung yang terafiliasi dengan salah satu tersangka.

Nilai pengadaan tersebut ditaksir mencapai angka Rp 148 miliar selama periode 2024-2026.

Korupsi dana bantuan ini bukan kejahatan biasa, ini adalah kezaliman yang luar biasa. Bagaimana mungkin mereka tega mengambil keuntungan di tengah kesulitan

yang dialami oleh para korban bencana, mulai dari banjir dan tanah longsor di Sumatera, gempa di NTT, karhutla di Kalimantan, Jambi, Palembang dan Papua.

Orang yang diberi amanah untuk menangani bencana, justru memberikan bencana tambahan bagi para korban.

Semua ini terjadi karena penerapan sistem kapitalis sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Akibatnya manusia tidak jauh dari agama dan tidak memiliki benteng keimanan dalam dirinya.

Sehingga mereka tidak sadar bahwa setiap perbuatannya akan diawasi oleh Allah dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Mereka tidak takut melakukan

kezaliman karena tidak ada keimanan akan hari akhirat.

Sistem kapitalis menjadikan materi sebagai tujuan, dan tidak jarang orang melakukan apapun demi keuntungan sekalipun itu menimbulkan mudharat bagi orang lain.

Sistem ini juga melahirkan para pejabat yang krisis integritas, membuka celah korupsi mulai dari jual beli jabatan, suap menyuap, menyalahgunakan kewenangan, hingga menzalimi orang lain.

Hal ini diperparah oleh lemahnya pengawasan atau kontrol dari pemimpin pada para pembantu di bawahnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

Olahan Ungkot Leubim Antar Forikan Aceh Tamiang Raih Juara 1 Meuseuraya Rasa 2026

Oleh Hamdani · 25 Okt, 10.31 WIB



Kenua Forikan Aceh, Hj. Marlina Muzakir, bersama Kenua Forikan Kabupaten Aceh Tamiang, Yuyun Armia Pahlmi, dan tim menerima hadiah Juara 1 Lomba Masak Meuseuraya Rasa 2026 pada rangkaian Meuseuraya Festival 2026 di Balee Meuseuraya Aceh (BMA), Banda Aceh, Sabtu (24/10/2026)

BANDA ACEH — Tim Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Kabupaten Aceh Tamiang meraih Juara 1 Lomba Masak Meuseuraya Rasa 2026 melalui inovasi kuliner berbahan ikan kambing-kambing atau yang dikenal masyarakat Aceh sebagai ungkot leubim. Kompetisi tersebut berlangsung di Balee Meuseuraya Aceh (BMA), Banda Aceh, Sabtu (24/10/2026), dalam rangkaian Meuseuraya Festival 2026.

Tim Aceh Tamiang mengandalkan menu utama Rolade Kambing Dalica Aceh, yakni olahan ikan kambing-kambing yang dipadukan dengan bumbu rempah dan tumisan daun ubi segar sebagai isian rolade.

Menu tersebut disajikan bersama Nasi Minyak Khas Tamiang yang diolah dengan teknik dibakar, kemudian dilengkapi bumbu kari kaya rempah. Perpaduan bahan pangan lokal dan cita rasa khas daerah menjadi bagian dari kreativitas tim dalam menyajikan hidangan berbasis hasil perikanan.

Pemanfaatan ikan kambing-kambing dalam kreasi tersebut menjadi salah satu upaya memperkenalkan potensi komoditas perikanan lokal melalui sajian yang lebih variatif dan menarik. Ikan yang belum banyak dimanfaatkan dalam kreasi kuliner bernilai tambah itu diolah menjadi hidangan yang berpotensi dikenal lebih luas oleh masyarakat.

Selain mendorong kreativitas memasak, inovasi tersebut juga memperlihatkan peluang pengembangan produk kuliner berbasis hasil perikanan lokal. Pengolahan ikan menjadi menu bercita rasa khas diharapkan dapat memperluas pilihan konsumsi ikan sekaligus membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM kuliner.

Keberhasilan meraih Juara 1 menjadi capaian bagi Tim Forikan Aceh Tamiang dalam mempromosikan potensi kuliner daerah. Inovasi berbahan ungkot leubim tersebut sekaligus menunjukkan bahwa komoditas ikan lokal dapat dikembangkan menjadi sajian kreatif dengan nilai tambah ekonomi.

Lomba Masak Meuseuraya Rasa merupakan salah satu agenda dalam Meuseuraya Festival 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Kegiatan tersebut menjadi wadah promosi kuliner daerah dan penguatan UMKM lokal, sekaligus mengangkat kekayaan pangan dan budaya kuliner Aceh.

Melalui inovasi pengolahan ikan lokal, diharapkan semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha yang mengembangkan kreasi kuliner berbahan ikan. Upaya ini juga sejalan dengan promosi konsumsi ikan dan penguatan daya saing produk olahan perikanan Aceh.[]

LIFESTYLE

Kreatif Mengolah Ikan, Saat Ungkot Leubim Siap Naik Kelas ke Meja Restoran dan Hotel

Oleh Hamdani · 24 Okt, 17.12 WIB

BANDA ACEH – Siapa sangka ikan kambing-kambing atau ungkot leubim, ikan lokal yang belum banyak dilihat sebagai sajian kuliner bernilai tinggi, dapat disulap menjadi hidangan kreatif yang menggugah selera? Potensi inilah yang diangkat dalam Lomba Masak Meuseuraya Rasa, bagian dari rangkaian Meuseuraya Festival 2026 di Balee Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Sabtu (24/10/2026).

Mengusung kreativitas dalam mengolah hasil perikanan, lomba ini mengajak peserta melihat ikan lokal dari sudut pandang berbeda. Bukan sekadar bahan pangan sehari-hari, ungkot leubim berpotensi menjadi sajian istimewa dengan cita rasa khas, tampilan menggoda, dan nilai jual yang lebih tinggi.

Melalui sentuhan kreativitas, teknik pengolahan, racikan bumbu, serta penyajian yang

menarik, ikan yang selama ini belum optimal nilai ekonominya dapat dikembangkan menjadi menu modern yang mampu bersaing di meja makan keluarga, restoran, hingga hotel.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh mengapresiasi penyelenggaraan Lomba Masak Meuseuraya Rasa yang diikuti 32 peserta dari berbagai kalangan.

Kegiatan ini menjadi panggung untuk mengeksplorasi kekayaan bahan baku ikan lokal sekaligus memperkenalkan ragam olahan perikanan yang lezat, bergizi, dan berpotensi memiliki nilai komersial.

Kasubkor P2HP DKP Aceh, Fitriani, S.Pi., M.Si., menyampaikan bahwa kreativitas merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan daya tarik konsumsi ikan sekaligus membuka peluang usaha kuliner berbasis hasil perikanan.

“Melalui lomba ini, kita ingin menunjukkan bahwa ikan lokal seperti ungkot leubim memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sajian yang istimewa. Dengan kreativitas dalam pengolahan dan penyajian, ikan tidak hanya menjadi menu rumahan, tetapi juga berpeluang menjadi hidangan unggulan di restoran maupun hotel,” ujar Fitriani.

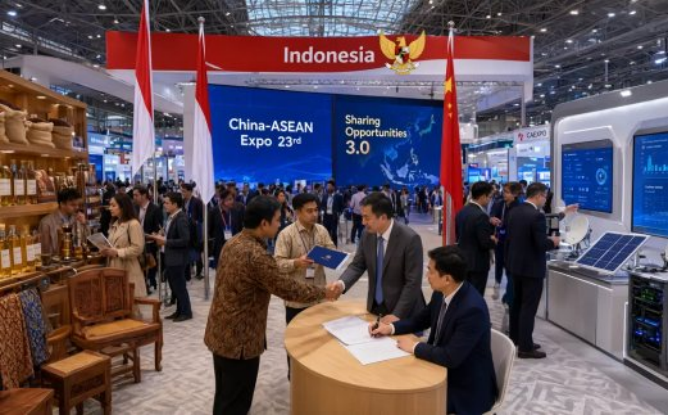
Menurutnya, inovasi kuliner berbahan ikan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk menghadirkan menu keluarga yang lebih variatif, sekaligus menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk menciptakan produk dengan tampilan menarik, cita rasa khas, dan nilai jual kompetitif.

Lebih dari sekadar kompetisi memasak, Meuseuraya Rasa menjadi ajang memperkenalkan bahwa kuliner berbasis ikan memiliki ruang luas untuk terus berinovasi.

EKONOMI

CAEXPO: Perusahaan Indonesia Ubah Peluang Tiongkok Jadi Profit Nyata

Oleh Redaksi · 25 Okt, 00.28 WIB



Paviliun Indonesia di China-ASEAN Expo (CAEXPO) ke-23 di Nanning, Tiongkok, menampilkan perpaduan apik antara produk tradisional seperti kopi, minyak sawit, dan furnitur

TIONGKOK - Pada 17 September, aroma kopi khas Indonesia berpadu dengan aroma minyak sawit yang tercium hingga ke lorong-lorong pameran di Nanning International Convention and Exhibition Center.

Hari itu menandai pembukaan China-ASEAN Expo (CAEXPO) ke-23. Tahun ini, pameran menempati area seluas 170.000 meter persegi, meningkat sekitar 6% dibandingkan tahun sebelumnya.

Lebih dari 3.400 perusahaan berpartisipasi dalam pameran yang diselenggarakan di tiga lokasi, yakni Nanning International Convention and Exhibition Center, Nanning ASEAN (NAN A) Community, dan Guilin International Convention and Exhibition Center.

Sekitar 50 kegiatan perdagangan dan ekonomi juga dijadwalkan berlangsung selama pameran.

Mengusung tema "Berbagi Peluang 3.0, Mewujudkan Kehidupan yang Lebih Baik Bersama", acara ini sekilas terdengar seperti agenda kerja sama ekonomi pada umumnya. Namun, suasana di paviliun Indonesia menunjukkan bahwa tema tersebut memiliki makna bisnis yang konkret.

Tahun ini, sebanyak 78 perusahaan Indonesia mengikuti CAEXPO, menjadikan Indonesia salah satu peserta dengan kehadiran terbesar di antara negara-negara ASEAN. Dengan luas paviliun hampir 2.000 meter persegi, Indonesia berada di kelompok teratas bersama Malaysia dan Thailand dalam hal skala partisipasi.

Sejumlah perusahaan besar turut hadir, termasuk Pertamina, perusahaan energi Indonesia yang masuk dalam daftar Fortune Global 500; Golden Peak Group, salah satu pemain utama di industrinya; serta PT Wahana Telekomunikasi yang bergerak di bidang komunikasi satelit. Perusahaan pengolahan produk turunan kelapa sawit, eksportir furnitur, serta produsen makanan dan minuman juga ambil bagian. Kehadiran mereka mencerminkan semakin beragamnya sektor bisnis Indonesia, mulai dari komoditas tradisional hingga kecerdasan buatan (AI) dan ekonomi hijau.

Lantas, mengapa perusahaan Indonesia begitu antusias mengikuti pameran ini?

Jawabannya cukup sederhana. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia selama 13 tahun berturut-turut. Pada 2025, nilai perdagangan bilateral kedua negara telah melampaui US\$100 miliar.

Minyak sawit, bijih nikel, kopi, dan karet dari Indonesia, serta kendaraan listrik, modul fotovoltaik, dan mesin konstruksi dari Tiongkok, telah menjadi bagian dari hubungan rantai pasok yang semakin erat antara kedua negara. Karena itu, bagi banyak perusahaan Indonesia, pertanyaannya bukan lagi apakah mereka perlu mengikuti CAEXPO, melainkan bagaimana memanfaatkan partisipasi tersebut dan produk atau solusi apa yang perlu mereka tawarkan.

Perubahan komposisi peserta di paviliun Indonesia tahun ini menjadi gambaran paling jelas dari perkembangan tersebut.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



INTERNASIONAL

Laporan CIA: Israel di Ambang Perang Sipil dan Pembubaran

Oleh Redaksi · 24 Okt, 15.26 WIB

BANDA ACEH - Israel menghadapi ancaman krisis internal yang berpotensi berkembang menjadi perang saudara, bahkan keruntuhan institusi negara.

Peringatan itu disebut tertuang dalam laporan rahasia Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) yang menyoroti semakin tajamnya perpecahan Politik, tekanan ekonomi, dan kelelahan militer setelah bertahun-tahun berperang.

Laporan yang disusun pada Agustus 2026 itu berjudul Frac-

ture From Within atau Retak dari Dalam.

Laporan Drop Site News yang diterbitkan bersama Capital & Empire pada 5 Oktober, menyebut penilaian tersebut disusun oleh unit Red Cell CIA, yang bertugas menguji asumsi umum dan mengembangkan analisis alternatif mengenai berbagai risiko strategis.

Menurut dua sumber AS yang mengetahui isi laporan tersebut, para analis CIA menilai sejumlah persoalan yang selama ini ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



LINGKUNGAN

Warga Diminta Waspada, BMKG: Hujan Lebat Berpotensi Guyur Aceh hingga 26 Oktober

Oleh Redaksi · 25 Okt, 01.07 WIB



Ilustrasi Hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di sejumlah wilayah dan dapat memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, serta pohon tumbang. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi cuaca ekstrem di Provinsi Aceh pada 24–26 Oktober 2026.

Hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di sejumlah wilayah dan dapat memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, serta pohon tumbang.

Peringatan tersebut disampaikan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Cucu Kusmayancu, melalui siaran pers yang diterbitkan pada Sabtu (24/10/2026).

BMKG mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah antisipasi selama periode tersebut.

Dalam analisisnya, BMKG mengidentifikasi perkembangan signifikan dinamika atmosfer yang berpotensi meningkatkan intensitas curah hujan di Aceh.

Aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO), keberadaan daerah belokan angin, serta konvergensi mendukung peningkatan aktivitas konvektif di wilayah tersebut.

Selain itu, suhu muka laut terantau hangat berkisar 29–31 derajat Celsius. Kelembapan udara yang tinggi di seluruh lapisan atmosfer turut mendukung penambahan uap air dan pembentukan awan hujan.

“Dengan adanya faktor-faktor ini, wilayah provinsi Aceh diprediksi akan menerima tambahan uap air, sehingga terjadi peningkatan pembentukan awan-awan hujan,” kata Cucu Kusmayancu.

Sejumlah Wilayah Berpotensi Terdampak

BMKG menyebutkan hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Subulussalam, Simeulue, Pidie, Pidie Jaya, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Nagan Raya.

Masyarakat di wilayah-wilayah tersebut diminta mewaspadaai potensi bencana hidrometeorologi. Dampak yang mungkin terjadi meliputi banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga pohon tumbang, bergantung pada tingkat kerawanan dan kondisi masing-masing daerah.

Masyarakat Diminta Pantau Informasi Resmi

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tetapi tidak mengabaikan potensi cuaca ekstrem. Langkah antisipatif diperlukan agar aktivitas sehari-hari tetap berlangsung dengan aman.

Masyarakat juga diminta terus memantau perkembangan cuaca melalui kanal resmi BMKG, termasuk akun media sosial @infobmkg_aceh.

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui layanan call center di nomor 08116788595 atau surat elektronik .

BMKG mengingatkan masyarakat agar merujuk informasi cuaca dari sumber resmi dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.[]

ISLAM

Santri, Kader Ulama Pembangun Peradaban Islam

Oleh Ummu Firly · 24 Okt, 14.10 WIB



ERINGATAN Hari Santri Nasional pada 22 Oktober 2026 mengusung tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”.

Melalui tema ini, Kementerian Agama mendorong santri untuk berkontribusi dalam pembangunan melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemandirian ekonomi, kreativitas, serta kepedulian sosial.

Arah tersebut tentu memiliki sisi positif. Namun, ada pertanyaan mendasar yang perlu direnungkan: apakah santri hari ini sedang dipersiapkan untuk menjadi generasi yang sekadar mampu mengisi pembangunan, atau kader ulama yang akan membimbing umat dan membangun peradaban Islam?

Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan data resmi Kementerian Agama per 4 Oktober 2026, sebanyak 4.634.406 santri telah terverifikasi melalui sistem By Name By Address (BNBA).

Angka tersebut merupakan hasil pendataan yang masih berlangsung, bukan jumlah final seluruh santri Indonesia.

Meski demikian, jutaan santri ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki umat Islam. Persoalannya, ke mana potensi sebesar ini hendak diarahkan?

Dari pesantren-pesantren sederhana, lahir orang-orang berilmu yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga menggerakkan umat, melawan penjajahan, dan mengorbankan jiwa demi mempertahankan kehormatan.

Pesantren bukan sekadar tempat menimba ilmu, melainkan ruang

pembentukan generasi yang menjadikan keimanan sebagai landasan hidup dan pengabdian kepada umat sebagai tanggung jawab.

Karena itu, arah pendidikan pesantren perlu terus dievaluasi agar tidak kehilangan tujuan mendasarnya: melahirkan generasi berilmu yang mampu membimbing umat dan meneruskan perjuangan Islam.

Dalam panduan resmi Hari Santri 2026, Kementerian Agama menegaskan pentingnya peran santri dalam menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Santri diharapkan menjadi generasi yang berkarakter, produktif, kreatif, adaptif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mandiri secara ekonomi, serta mampu memberikan kontribusi di berbagai bidang.

Tentu, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki keterampilan, serta mandiri secara ekonomi bukanlah sesuatu yang keliru. Islam justru mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, bekerja, dan memberikan manfaat bagi sesama.

Persoalannya bukan pada kemampuan apa yang harus dimiliki santri, melainkan pada orientasi besar yang mengarahkan seluruh kemampuan tersebut.

Jangan sampai kesibukan menyiapkan santri agar produktif, kompetitif, dan mampu mengisi berbagai sektor pembangunan justru membuat tujuan utama pendidikan Islam kehilangan tempatnya.

EDUKASI

Pohon Ditebang, Siswa SMAN 1 Simpang Ulim Mogok Belajar

Oleh Van · 24 Okt, 12.11 WIB

ACEH TIMUR — Penebangan pepohonan di SMA Negeri 1 Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, memantik protes dari kalangan siswa.

Aksi demonstrasi yang disertai mogok belajar pada Jumat, 23 Oktober 2026, menjadi sorotan karena terjadi ketika pemerintah kabupaten sedang menggalakkan gerakan penghijauan melalui program penanaman 10.000 pohon.

Pohon-pohon yang ditebang disebut telah tumbuh selama 10 hingga 15 tahun. Keberadaannya selama ini memberikan keteduhan bagi warga sekolah, terutama ketika cuaca panas.

Hilangnya pepohonan tersebut memicu kekecewaan siswa yang mempertanyakan alasan di balik kebijakan penebangan itu.

Dalam pemberitaan yang terbit pada 23 Oktober 2026, kebijakan

tersebut dikaitkan dengan Kepala SMAN 1 Simpang Ulim, Laina Fariyani.

Para siswa menyalahkan perubahan lingkungan sekolah yang sebelumnya rindang menjadi lebih terbuka. Mereka juga menginginkan penjelasan mengenai pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut.

Menanggapi polemik itu, Laina Fariyani memberikan penjelasan kepada media pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Ia membenarkan adanya penebangan pohon dan mengakui bahwa pepohonan tersebut selama ini membuat lingkungan sekolah lebih sejuk.

Namun, menurut Laina, penebangan dilakukan karena sejumlah pohon dinilai berpotensi menimbulkan persoalan bagi lingkungan sekolah.

Ia menyebut akar yang semakin membesar dapat merusak lantai, daun yang berguguran menambah sampah, serta cabang pohon berisiko mengganggu jaringan listrik.

Laina juga menyampaikan bahwa pepohonan di dekat parit dianggap menghambat aliran air ketika hujan turun.

Menurut penjelasannya, penebangan tersebut bukan semata-mata untuk menghilangkan penghijauan, melainkan bagian dari penataan lingkungan sekolah.

Ia mengungkapkan bahwa keputusan tersebut juga disebut berdasarkan arahan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Timur yang telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Aceh.

Pernyataan ini perlu dikonfirmasi kepada kedua pejabat terkait agar dasar kebijakan dan pemba-

gian tanggung jawabnya menjadi terang.

Laina menyatakan bahwa pepohonan yang ditebang akan digantikan dengan tanaman produktif, antara lain mangga, kelapa, sawo, dan rambutan.

Menurutnya, penanaman jenis pohon tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi warga sekolah sekaligus menghadirkan kembali lingkungan hijau.

Ia juga menyebut penataan lahan dapat membuka ruang untuk kegiatan olahraga, termasuk lapangan futsal.

Meski demikian, rencana penggantian pohon tersebut masih perlu ditindaklanjuti dengan informasi yang lebih jelas mengenai jumlah tanaman, jadwal penanaman, jenis pohon penebih, dan mekanisme perawatannya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

